JURNAL PENYULUHAN

Jurnal Penyuluhan Vol. 22 (02) 2026 | 323-351
https://doi.org/10.25015/22202674122
E-ISSN: 2442-4110 | P-ISSN: 1858-2664

Kegagalan Dinamika Partisipatif Kelompok Peternak: Analisis Interaksi, Kelembagaan, dan Peran Pendamping

Failure of Participatory Dynamics in Livestock Farmer Groups: An Analysis of Interaction, Institutions, and Facilitator Roles

Unang Yunasaf [1,*)], Rachda Anjarwati Nurhakim Kohar[2], Mochamad Ali Mauludin[3], Lilis Nurlina[4], Syahirul Alim[5]

[1,3,4,5]Departemen Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung–Sumedang KM. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia
[2]Program Pasca Sarjana Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung–Sumedang KM. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia
[*)]*E-mail correspondence:* unang.yunasaf@unpad.ac.id

Diterima: 13 Juli 2026 | Direvisi: 09 September 2026 | Disetujui: 08 Oktober 2026 | Publikasi Online: 02 November 2026

ABSTRAK

Partisipasi merupakan unsur penting dalam keberhasilan pengembangan peternakan berbasis kelompok dan program penyuluhan. Namun, sebagian kelompok peternak menghadapi rendahnya partisipasi anggota, lemahnya kelembagaan, konflik internal, dan persoalan keberlanjutan organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan dinamika partisipatif pada Kelompok Balai Ternak "Buangsa" di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan mencakup ketua kelompok, anggota aktif, anggota kurang aktif, mantan anggota, dan pendamping program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña serta analisis tematik Braun dan Clarke. Temuan menunjukkan bahwa kemunduran dinamika partisipatif berkaitan dengan komunikasi yang kurang dialogis, dominasi pengambilan keputusan oleh anggota inti, lemahnya struktur kelembagaan dan kontrol sosial, konflik internal yang mengikis kepercayaan, tekanan ekonomi rumah tangga, serta pendekatan pendampingan yang masih teknokratis. Kondisi tersebut berkaitan dengan partisipasi semu, melemahnya kohesi kelompok, menguatnya orientasi individual, dan rendahnya keberlanjutan kelompok. Penelitian menegaskan pentingnya integrasi komunikasi partisipatif, penguatan kelembagaan dan modal sosial, serta pendampingan berbasis pemberdayaan dalam pengembangan kelompok peternak.

Kata kunci: dinamika partisipatif, kelompok peternak, kelembagaan sosial, modal sosial, penyuluhan partisipatif

ABSTRACT

Participation is an important element in the success of group-based livestock development and agricultural extension programs. However, some livestock farmer groups experience low member participation, weak institutional capacity, internal conflict, and organizational sustainability problems. This study aims to analyze the failure of participatory dynamics in the "Buangsa" Livestock Farmer Group in Belendung Village, Cibogo Subdistrict, Subang Regency, West Java. The study employed a qualitative approach with a case study strategy. Informants were purposively selected and included the group leader, active members, less-active members, former members, and program facilitators. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, and analyzed interactively using the Miles, Huberman, and Saldaña framework combined with Braun and Clarke's thematic analysis. The findings indicate that declining participatory dynamics were associated with non-dialogical communication, dominance of decision-making by core members, weak institutional structures and social control, internal conflicts that eroded trust, household economic pressures, and technocratic facilitation approaches. These conditions were associated with pseudo-participation, weakened group cohesion, stronger individualistic orientations, and low organizational sustainability. The study highlights the importance of integrating participatory communication, institutional and social-capital strengthening, and empowerment-oriented facilitation in livestock farmer group development.

Keywords: *participatory dynamics, livestock farmer groups, social institutions, social capital, participatory extension*

PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan berbasis kelompok selama ini diposisikan sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan peternakan. Dalam pendekatan penyuluhan modern, kelompok peternak tidak hanya dipahami sebagai wadah administratif penerima program, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial, penguatan modal sosial, dan pengembangan tindakan kolektif masyarakat pedesaan (Pretty, 1995; Chambers, 1997). Melalui kelompok peternak, anggota diharapkan mampu membangun kerja sama ekonomi, meningkatkan akses terhadap informasi dan inovasi teknologi, memperkuat posisi tawar pasar, serta menciptakan proses pembelajaran partisipatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok peternak tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis produksi ternak, tetapi juga sangat berkaitan dengan kualitas interaksi sosial, efektivitas kelembagaan kelompok, dan kemampuan penyuluhan dalam membangun partisipasi kolektif anggota kelompok.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kelompok peternak di pedesaan menghadapi persoalan rendahnya partisipasi anggota, lemahnya kelembagaan kelompok, konflik internal, dan rendahnya keberlanjutan organisasi. Penelitian terdahulu umumnya menelaah partisipasi dari sisi fungsi kelompok, kinerja penyuluhan, atau kapasitas kelembagaan secara terpisah. Studi ini berangkat dari fenomena empiris pada Kelompok Balai Ternak "Buangsa" yang memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi berkelindan dengan pola komunikasi, relasi kekuasaan, kelembagaan, modal sosial, dan tekanan penghidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada proses sosial yang menjelaskan mengapa partisipasi yang secara formal tersedia tidak berkembang menjadi keterlibatan kolektif yang substantif.

Fenomena tersebut juga terjadi pada Kelompok Balai Ternak "Buangsa" yang berada di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa Belendung merupakan wilayah pedesaan yang sebagian masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian dan peternakan rakyat sebagai sumber penghidupan rumah tangga. Secara sosial ekonomi, masyarakat desa memiliki karakteristik usaha skala kecil dengan keterbatasan modal, ketergantungan terhadap tenaga kerja keluarga, dan pola usaha yang masih bersifat tradisional. Selain sektor pertanian, wilayah Kecamatan Cibogo dan kawasan Subang secara umum juga mengalami perubahan struktur ekonomi pedesaan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya kawasan industri, meningkatnya mobilitas tenaga kerja, serta terbukanya peluang kerja non-pertanian menyebabkan orientasi ekonomi masyarakat pedesaan mulai mengalami pergeseran. Generasi muda desa cenderung lebih tertarik bekerja di sektor industri dan jasa dibandingkan melanjutkan usaha peternakan rakyat yang dianggap memiliki tingkat risiko tinggi dan pendapatan yang tidak menentu.

Kondisi tersebut menyebabkan kelompok peternak di pedesaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis budidaya ternak, tetapi juga menyangkut keberlanjutan partisipasi anggota, regenerasi peternak muda, dan kemampuan kelompok mempertahankan solidaritas sosial di tengah perubahan ekonomi pedesaan. Dalam konteks Desa Belendung, Kelompok Balai Ternak "Buangsa" awalnya dibentuk sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kelompok. Kelompok ini diharapkan menjadi media penguatan ekonomi rumah tangga peternak sekaligus sarana pembelajaran kolektif masyarakat desa. Pada fase awal pembentukan, kelompok menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan jumlah anggota yang relatif banyak serta adanya antusiasme masyarakat terhadap program peternakan kelompok.

Namun dalam perkembangannya, kelompok menghadapi berbagai persoalan internal yang menyebabkan menurunnya dinamika partisipatif anggota kelompok. Aktivitas kelompok mulai mengalami penurunan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok, lemahnya komunikasi antaranggota, konflik dalam pengelolaan ternak, menurunnya kepercayaan sosial, ketimpangan kontribusi kerja, dan berkurangnya jumlah anggota aktif kelompok. Dalam situasi tersebut, kelompok tidak hanya menghadapi persoalan teknis usaha peternakan, tetapi juga mengalami krisis sosial kelembagaan yang berkaitan dengan keberlanjutan organisasi kelompok secara keseluruhan. Permasalahan partisipasi dalam kelompok peternak selama ini sering kali dipahami secara sempit sebagai persoalan rendahnya motivasi individu anggota atau kurangnya keterampilan teknis peternak. Padahal, partisipasi pada dasarnya merupakan proses sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, kualitas komunikasi, kapasitas kelembagaan, kondisi ekonomi rumah tangga, dan dinamika sosial yang berkembang dalam kelompok (Habermas, 1985; Arnstein, 1969).

Dalam konteks kelompok peternak, partisipasi tidak hanya berarti kehadiran anggota dalam rapat atau kegiatan teknis, tetapi juga mencakup keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan organisasi, pembangunan rasa memiliki terhadap kelompok, serta kemampuan membangun tindakan kolektif secara berkelanjutan. Selain itu, lemahnya partisipasi kelompok peternak juga sering berkaitan dengan pendekatan penyuluhan yang masih bersifat teknokratis dan top-down. Pendekatan penyuluhan yang terlalu berfokus pada transfer teknologi dan peningkatan produksi sering kali kurang memperhatikan penguatan relasi sosial, modal sosial, dan kapasitas kelembagaan kelompok (Freire, 1970; Chambers, 1997). Akibatnya, kelompok menjadi sangat bergantung pada pendamping eksternal dan kurang berkembang menjadi organisasi yang mandiri.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya memahami kegagalan dinamika partisipatif kelompok peternak secara lebih mendalam melalui analisis interaksi sosial, kelembagaan kelompok, konflik internal, tekanan ekonomi rumah tangga, serta peran pendamping dalam program penyuluhan pada konteks nyata masyarakat pedesaan di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan aspek teknis usaha peternakan atau bentuk dan kualitas partisipasi secara kuantitatif, penelitian ini menempatkan partisipasi sebagai fenomena sosial yang dibentuk melalui interaksi multidimensional antara dinamika komunikasi kelompok, distribusi kekuasaan, kapasitas kelembagaan, modal sosial, tekanan ekonomi rumah tangga, dan praktik penyuluhan yang berkembang dalam kelompok peternak.

Kajian tentang dinamika kelembagaan, kelompok tani-ternak, dan partisipasi anggota telah berkembang dalam studi penyuluhan dan sosiologi pedesaan. Sebagian penelitian menekankan tingkat atau faktor partisipasi, sementara penelitian lain menyoroti kualitas layanan penyuluhan, kapasitas kelembagaan, atau relasi penyuluh-petani. Namun, masih diperlukan pembacaan yang menghubungkan dimensi komunikasi, relasi kekuasaan, aturan kelembagaan, modal sosial, dan kondisi penghidupan dalam satu kasus kelompok peternak yang mengalami kemunduran partisipatif. Kesenjangan ini menjadi dasar penelitian untuk membaca kegagalan partisipasi bukan sebagai persoalan motivasi anggota semata, melainkan sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi berbagai kondisi sosial, kelembagaan, dan ekonomi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian: (1) bagaimana dinamika interaksi dan pola komunikasi terbentuk dalam kelompok peternak?; (2) bagaimana bentuk dan kualitas partisipasi anggota diwujudkan dalam kegiatan kelompok?; (3) kondisi kelembagaan, modal sosial, dan tekanan penghidupan apa yang berkaitan dengan keberlanjutan kelompok?; dan (4) bagaimana peran pendamping dapat diperkuat agar penyuluhan lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika interaksi dalam kelompok peternak; (2) mengkaji bentuk dan kualitas partisipasi anggota; (3) mengidentifikasi kondisi kelembagaan dan eksternal yang berkaitan dengan keberlanjutan kelompok; serta (4) merumuskan implikasi strategis bagi pengembangan pendekatan penyuluhan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini menawarkan sintesis analitis integratif yang mempertemukan komunikasi partisipatif, kelembagaan, modal sosial, dan kondisi penghidupan untuk membaca kegagalan dinamika partisipatif dalam kelompok peternak. Kontribusi tersebut bersifat kontekstual dan analitis, bukan klaim pembentukan teori baru. Secara praktis, hasil penelitian diarahkan untuk memperkuat desain pendampingan yang lebih dialogis, sensitif terhadap konflik, dan responsif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga peternak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena kegagalan dinamika partisipatif dalam kelompok peternak. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan gejala sosial secara deskriptif, tetapi juga memahami makna, pengalaman, relasi sosial, serta proses interaksi yang membentuk rendahnya partisipasi anggota dalam kelompok peternak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan holistik berdasarkan pengalaman nyata para aktor yang terlibat dalam kelompok. Dalam konteks penelitian ini, dinamika partisipasi dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, relasi kekuasaan, pengalaman kolektif, konflik, dan praktik kelembagaan yang berkembang dalam kelompok peternak. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi pengalaman dan interaksi antarindividu dalam konteks sosial tertentu. Paradigma ini dipilih

karena penelitian berupaya memahami bagaimana anggota kelompok memaknai partisipasi, konflik, kepemimpinan, dan keberlanjutan kelompok berdasarkan pengalaman sosial mereka sendiri. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis bertujuan memahami makna subjektif yang dibangun oleh individu melalui pengalaman sosial dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi statistik, tetapi pada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) mengenai dinamika sosial dalam kelompok peternak.

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Strategi ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit sosial tertentu, yaitu Kelompok Balai Ternak Buangsa, yang dianggap merepresentasikan fenomena kegagalan dinamika partisipatif dalam kelompok peternak berbasis komunitas. Menurut Yin, (2018) studi kasus digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara jelas Dalam penelitian ini, rendahnya partisipasi anggota tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu, tetapi harus dianalisis dalam konteks relasi sosial, kelembagaan kelompok, tekanan ekonomi, dan praktik penyuluhan yang berkembang dalam kelompok. Studi kasus dalam penelitian ini bersifat instrumental (*instrumental case study*), yaitu menggunakan kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa untuk memahami isu yang lebih luas mengenai kegagalan partisipasi kelompok peternak dalam program penyuluhan berbasis komunitas.

Penelitian dilaksanakan pada Kelompok Balai Ternak Buangsa yang merupakan kelompok peternak domba berbasis komunitas dalam program pendampingan peternakan. Kelompok ini dipilih secara purposive karena mengalami dinamika sosial yang kompleks, seperti terjadinya penurunan jumlah anggota secara signifikan, lemahnya partisipasi anggota, konflik internal kelompok, rendahnya kohesivitas sosial, dan menurunnya keberlanjutan kelompok. Pada awal pembentukan, kelompok memiliki sekitar 20 anggota yang sebagian besar berasal dari masyarakat pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Dalam perkembangannya, jumlah anggota aktif mengalami penurunan hingga tersisa sekitar enam anggota aktif. Kondisi tersebut menjadikan kelompok ini relevan sebagai lokasi penelitian karena mampu menggambarkan bagaimana dinamika interaksi, kelembagaan, dan pendekatan penyuluhan berkaitan dengan keberlanjutan kelompok peternak. Penelitian dilakukan selama bulan November dan Desember 2025.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara iteratif. Proses dihentikan ketika wawancara dan sumber data tambahan tidak lagi memperluas tema utama, sementara wawancara berikutnya terutama memperdalam atau mengonfirmasi kategori yang telah terbentuk. Dengan demikian, kejenuhan data ditentukan secara substantif berdasarkan pengulangan informasi dan kecukupan kedalaman untuk menjawab pertanyaan penelitian, bukan berdasarkan persentase variasi kode (Guest et al., 2006; Saunders et al., 2018; Hennink & Kaiser, 2022).

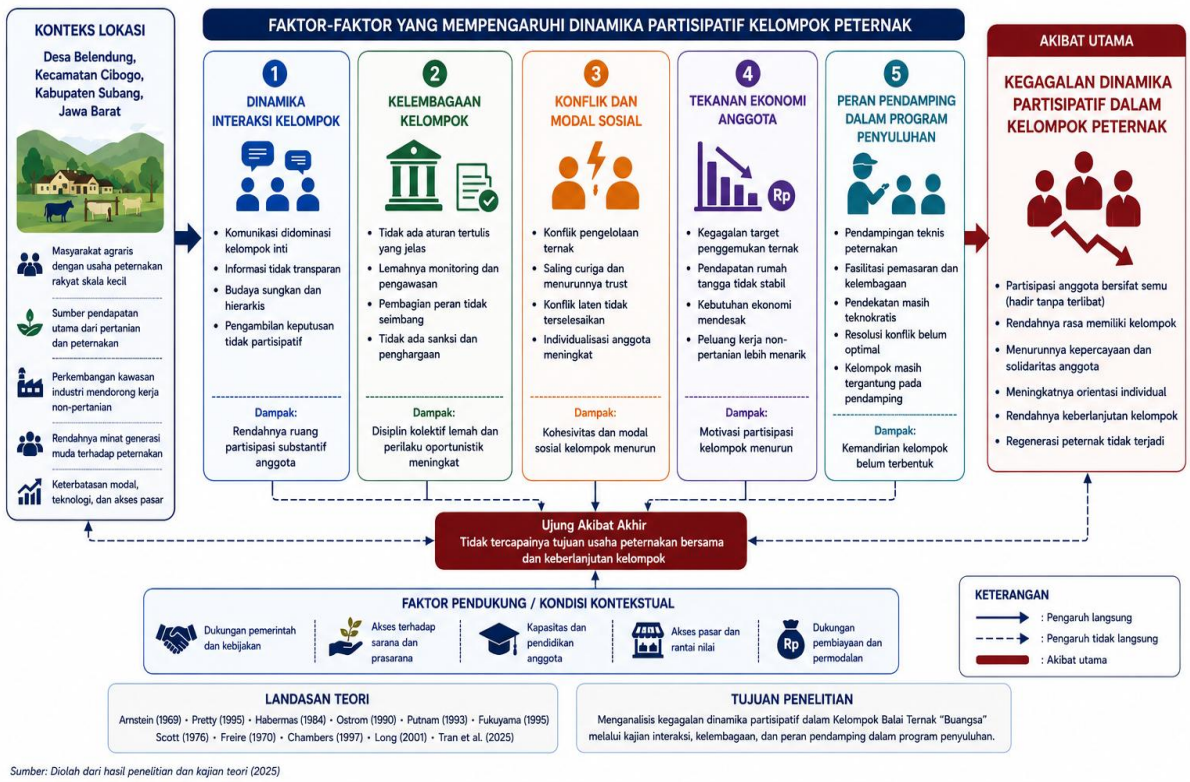
Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, persepsi, motivasi, dan interpretasi informan mengenai dinamika kelompok peternak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara fleksibel agar peneliti tetap memiliki ruang untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkembang di lapangan. Topik wawancara meliputi: proses pembentukan kelompok, pola komunikasi dan interaksi sosial, bentuk partisipasi anggota, konflik internal kelompok, pengelolaan usaha ternak, peran pendamping, dan faktor keberlanjutan kelompok. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian menggunakan bahasa yang dipahami informan agar proses komunikasi berlangsung lebih natural dan mendalam. Menurut Kvale (1996), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai pengalaman hidup dan makna sosial yang dibangun oleh informan.

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kelompok peternak. Teknik ini digunakan untuk memahami perilaku sosial, pola interaksi, komunikasi informal, serta praktik partisipasi anggota dalam situasi nyata. Observasi dilakukan pada: kegiatan rapat kelompok, aktivitas pemeliharaan ternak, pencarian pakan, kegiatan pemasaran, interaksi informal antaranggota, dan proses penyelesaian konflik kelompok. Selama observasi, peneliti menyusun catatan lapangan (*field notes*) yang memuat deskripsi situasi sosial, pola komunikasi anggota, ekspresi emosional, dinamika konflik, dan refleksi peneliti terhadap fenomena lapangan. Menurut James P. Spradley, observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami budaya dan praktik sosial kelompok berdasarkan perspektif pelaku secara langsung (Spradley, 2016).

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi: daftar hadir anggota, catatan rapat kelompok, laporan kegiatan kelompok, data produksi ternak, dokumentasi foto kegiatan, serta dokumen program pendampingan. Dokumentasi membantu peneliti melakukan verifikasi dan triangulasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Untuk mendukung proses tersebut digunakan instrumen pendukung berupa: pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan jurnal refleksi peneliti. Instrumen tersebut digunakan untuk meningkatkan kedalaman, ketepatan, dan konsistensi data penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Model Miles et al. (2018) digunakan sebagai kerangka pengelolaan dan verifikasi data melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Di dalam kerangka tersebut, analisis tematik Braun dan Clarke (2006) digunakan sebagai teknik utama untuk mengembangkan kode, kategori, dan tema. Proses tematik meliputi familiarisasi dengan transkrip, pemberian kode awal, pengelompokan kode, peninjauan tema, penamaan tema, dan interpretasi hubungan antartema. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan secara terus-menerus untuk menjaga keterlacakan interpretasi.

Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu serta *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan ketua, anggota, mantan anggota, dan pendamping; triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi; sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi pada kesempatan pengumpulan data yang berbeda. Hasil interpretasi sementara dikonfirmasi kepada informan untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti tidak menyimpang dari pengalaman mereka. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis. Penelitian memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, meliputi persetujuan informan (informed consent), kerahasiaan identitas, penggunaan data untuk kepentingan akademik, dan penghormatan terhadap pengalaman sosial informan.



Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan kajian teori (2025)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Analisis Dinamika Partisipatif dalam Kelompok Balai Ternak "Buangsa" di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kerangka ini merupakan *sensitizing framework* yang disusun sebelum analisis untuk memandu perhatian peneliti pada hubungan konseptual antara komunikasi dan relasi kekuasaan, bentuk dan kualitas partisipasi, kelembagaan dan kontrol sosial, modal sosial, kondisi penghidupan, serta peran pendamping. Kerangka ini tidak diposisikan sebagai model kausal yang diuji, melainkan sebagai peta analitis yang kemudian dipertajam oleh temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika partisipatif dalam Kelompok Balai Ternak "Buangsa" di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembahasan difokuskan pada bagaimana interaksi sosial, kelembagaan kelompok, konflik internal, tekanan ekonomi rumah tangga, serta peran pendamping dalam program penyuluhan membentuk dinamika partisipasi anggota kelompok peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika partisipatif kelompok tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan rendahnya kehadiran anggota dalam kegiatan kelompok, tetapi merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan, kualitas komunikasi, modal sosial, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks Kelompok Balai Ternak "Buangsa", berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan secara bertahap berkaitan dengan keberlanjutan kelompok peternak. Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara tematik berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Setiap tema dianalisis secara kritis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan teori partisipasi, modal sosial, kelembagaan komunitas, dan pendekatan penyuluhan partisipatif. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kelompok, tetapi juga menjelaskan hubungan antar faktor yang membentuk kegagalan dinamika partisipatif kelompok peternak dalam konteks pembangunan peternakan berbasis komunitas.

Tabel 1. Profil Demografis Informan Penelitian

Kode Informan	Peran/ Kategori Informan	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan Terakhir	Lama Keanggotaan (Tahun)	Jumlah Kepemilikan Ternak Rata-Rata (Ekor)	Tingkat Keaktifan & Peran Dominan dalam Kelompok
INF-01	Ketua Kelompok Balai Ternak	54	SD	2	21	Sangat Aktif; Pengambil Keputusan Utama; Akses Langsung ke Pendamping.
INF-02	Anggota Aktif (Kelompok Inti)	50	SD	2	18	Aktif; Mengelola Operasional Kandang; Memiliki Hubungan Dekat dengan Ketua.
INF-03	Anggota Aktif	78	SMP	2	9	Aktif; Terlibat pada mengangon ternak, membersihkan kandang (Mencari Rumput/Pakan).
INF-04	Anggota Kurang Aktif	67	SD	2	11	Pasif; Menghindari Pertemuan Kelompok karena Sungkan dan Bekerja Serabutan.
INF-05	Anggota Kurang Aktif	65	SD	2	11	Pasif; Lebih Banyak Berfokus pada Pekerjaan Harian Luar Sektor Pertanian.
INF-06	Anggota Aktif	61	SMA	2	18	Aktif; dalam pengolahan limbah ternak, dan pemberian pakan.
INF-07	Mantan Anggota	36	SMA	1,5 (Keluar 2024)	0 (Sudah Dijual)	Tidak Aktif; Keluar akibat Konflik Menjual dan Membawa Kabur Ternak Tanpa Diskusi dengan Ketua dan anggota lainnya.
INF-08	Pendamping Program Penyuluhan	28	S1 Peternakan	2	N/A	Pendamping Lapangan; Fokus pada Target Teknis dan Pemasaran Program.

Keterangan N/A: non anggota

Posisi teoretis penelitian disusun secara hierarkis. Paradigma penelitian adalah konstruktivis, sedangkan payung teoretis utamanya adalah komunikasi partisipatif yang menempatkan dialog, kesetaraan, dan pemberdayaan sebagai orientasi analisis (Freire, 1970; Habermas, 1985). Pada tingkat *middle-range*,

konsep tindakan komunikatif, tangga partisipasi, modal sosial, dan kelembagaan digunakan sebagai lensa untuk membaca pola interaksi, kualitas partisipasi, norma, kepercayaan, serta tindakan kolektif (Habermas, 1985; Arnstein, 1969; Putnam, 1993; Ostrom, 1990). Dengan hierarki ini, teori tidak diperlakukan sebagai model yang diuji, tetapi sebagai perangkat interpretatif untuk membaca data kasus.

Tabel 2. Analisis Tematik Penelitian

No	Tema Utama	Subtema	Temuan Utama Penelitian	Interpretasi Kritis
1	Dinamika Interaksi Kelompok	Dominasi komunikasi kelompok inti	Interaksi kelompok masih didominasi ketua dan anggota inti sehingga komunikasi belum dialogis	Menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan (*power asymmetry*) yang menghasilkan partisipasi semu
		Komunikasi tidak transparan	Informasi terkait pengelolaan kelompok tidak tersebar merata	Rendahnya transparansi memperlemah trust dan kohesivitas kelompok
		Budaya sungkan	Anggota enggan menyampaikan kritik kepada pengurus	Budaya hierarkis membatasi komunikasi partisipatif
2	Bentuk dan Kualitas Partisipasi	Partisipasi pasif	Anggota hanya hadir pada kegiatan tertentu tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan	Partisipasi bersifat prosedural, belum substantif
		Orientasi bantuan	Sebagian anggota bergabung karena berharap bantuan ternak	Partisipasi berbasis insentif cenderung tidak berkelanjutan
		Rendahnya *sense of ownership*	Anggota merasa kelompok dikendalikan oleh pihak tertentu	Lemahnya rasa memiliki menyebabkan rendahnya komitmen kolektif
3	Kelembagaan Kelompok	Tidak adanya aturan formal	Kelompok tidak memiliki aturan tertulis yang jelas	Kelembagaan informal menyebabkan lemahnya kontrol sosial
		Lemahnya monitoring	Tidak ada pengawasan terhadap anggota yang tidak aktif	Absennya monitoring meningkatkan perilaku oportunistik
		Ketimpangan beban kerja	Aktivitas kelompok hanya dijalankan oleh anggota tertentu	Ketimpangan kontribusi menurunkan solidaritas kelompok
4	Konflik dan Menurunnya Trust	Konflik pengelolaan ternak	Kehilangan ternak memunculkan saling curiga antaranggota	Konflik berkembang menjadi krisis kepercayaan sosial
		Konflik laten	Konflik tidak diselesaikan secara terbuka	Konflik laten memperlemah kohesivitas kelompok
		Individualisasi anggota	Anggota mulai fokus pada kepentingan pribadi	Menunjukkan erosi modal sosial kelompok
5	Tekanan Ekonomi dan Kegagalan Produksi	Kegagalan usaha ternak	Target penggemukan ternak tidak tercapai	Kegagalan produksi menurunkan legitimasi kelompok
		Tekanan ekonomi rumah tangga	Anggota lebih memilih pekerjaan lain	Strategi survival rumah tangga mengurangi partisipasi kolektif
		Penjualan ternak dini	Ternak dijual sebelum waktunya karena kebutuhan ekonomi	Menunjukkan kerentanan ekonomi rumah tangga peternak
6	Peran Pendamping dan Penyuluhan	Penyuluhan teknokratis	Pendampingan lebih fokus pada aspek teknis ternak	Pendekatan teknis belum menyentuh persoalan sosial kelompok
		Ketergantungan pada pendamping	Kelompok menjadi pasif tanpa kehadiran pendamping	Kemandirian kelompok belum terbentuk
		Keterbatasan resolusi konflik	Pendamping kesulitan menyelesaikan konflik internal	Penyuluhan belum optimal sebagai fasilitasi sosial

Kerangka konseptual penelitian ditempatkan pada bagian metode sebagai peta analitis yang mengarahkan pembacaan kasus. Kerangka tersebut menghubungkan empat dimensi utama—komunikasi dan relasi kekuasaan, partisipasi, kelembagaan dan kontrol sosial, serta modal sosial dan kondisi penghidupan—dengan peran pendamping sebagai konteks fasilitasi. Kerangka ini berfungsi sebagai *sensitizing framework*, bukan sebagai model kausal yang diuji secara statistik. Hasil penelitian kemudian digunakan untuk menilai, memperluas, atau menata ulang hubungan antardimensi tersebut. Kerangka konseptual ditampilkan pada Gambar 1.

Dinamika Interaksi dalam Kelompok Peternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika interaksi dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa belum berkembang menjadi interaksi yang partisipatif, dialogis, dan setara. Interaksi antaranggota masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah dan ketergantungan terhadap figur tertentu dalam kelompok, terutama ketua kelompok dan anggota inti yang dianggap lebih memiliki pengalaman maupun kedekatan dengan pendamping program. Dalam praktik keseharian kelompok, proses komunikasi lebih banyak berlangsung secara instruktif dibandingkan deliberatif. Sebagian besar keputusan terkait pengelolaan

ternak, penjualan hasil usaha, hingga pembagian tugas kelompok ditentukan oleh aktor tertentu tanpa melalui proses diskusi yang terbuka dan setara. Hal ini terungkap dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa: "*Kalau rapat biasanya yang bicara hanya ketua sama beberapa orang saja. Kami lebih banyak mendengarkan."* (INF-03, Anggota Aktif, 2025).*"Kadang sebenarnya ingin menyampaikan pendapat, tapi merasa percuma karena keputusan biasanya sudah diarahkan."* (INF-05, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Keadaan ini menunjukkan bahwa dominasi kelompok inti merupakan bentuk hambatan komunikasi partisipatif yang melumpuhkan tindakan komunikatif yang setara. Ketika ruang publik kelompok dikolonisasi oleh kepentingan strategis pengurus, dialog yang murni (deliberatif) tersumbat dan digantikan oleh kepatuhan semu anggota pasif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola interaksi dalam kelompok masih bersifat hierarkis. Relasi sosial yang terbentuk belum mampu menciptakan ruang komunikasi yang inklusif bagi seluruh anggota kelompok. Dalam perspektif Arnstein's Ladder of Participation, situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota masih berada pada tingkat tokenism, yaitu anggota secara formal dilibatkan dalam kegiatan kelompok tetapi tidak memiliki keterkaitan nyata terhadap proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).

Secara sosial, dominasi komunikasi oleh aktor tertentu menyebabkan munculnya ketimpangan relasi kekuasaan (power asymmetry) dalam kelompok. Ketimpangan tersebut menyebabkan sebagian anggota merasa kurang memiliki posisi dan keterkaitan dalam organisasi kelompok. Akibatnya, anggota cenderung memilih diam, menghindari konflik, dan mengikuti keputusan yang telah ditentukan. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan kultur sosial masyarakat pedesaan yang masih kuat menjunjung nilai kesopanan, rasa sungkan, dan penghormatan terhadap figur yang dianggap lebih senior atau lebih berketerkaitan. Dalam konteks kelompok, budaya tersebut menyebabkan anggota enggan menyampaikan kritik maupun pendapat yang berbeda. Hal ini terungkap dari penuturan informan yang mengatakan: "Kami tidak enak kalau terlalu banyak bicara karena takut dianggap melawan." (INF-03, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi tidak hanya bersumber dari aspek organisasi, tetapi juga berkaitan dengan budaya sosial lokal yang membentuk pola komunikasi kelompok. Menurut Habermas (1985), komunikasi partisipatif hanya dapat terbentuk apabila setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan gagasan tanpa tekanan dominasi maupun rasa takut. Dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, ruang komunikasi yang setara belum terbentuk secara optimal.

Selain itu, lemahnya interaksi dialogis menyebabkan proses pertukaran informasi dalam kelompok berjalan tidak merata. Informasi mengenai kondisi usaha kelompok, pengelolaan keuangan, maupun strategi pemasaran lebih banyak diketahui oleh kelompok inti dibandingkan anggota lainnya. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kami kurang tahu perkembangan kelompok secara detail, biasanya hanya diberi tahu seperlunya."* (INF-04, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Kurangnya keterbukaan informasi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dalam kelompok belum berjalan secara transparan. Dalam organisasi berbasis komunitas, transparansi informasi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan sosial (social trust) dan memperkuat kohesivitas kelompok. Ketika akses informasi hanya dimiliki oleh sebagian kecil anggota, maka muncul jarak sosial antara kelompok inti dan anggota biasa. Penelitian Perkasa & Anang (2026) menunjukkan bahwa kualitas komunikasi interpersonal memiliki keterkaitan signifikan terhadap partisipasi anggota kelompok tani. Komunikasi yang terbuka dan dialogis dapat meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap kelompok, sementara komunikasi yang tertutup cenderung menurunkan motivasi partisipasi (Dewi & Aesthetika, 2025).

Dalam dinamika kelompok, lemahnya komunikasi juga berdampak pada rendahnya kemampuan kelompok dalam menyelesaikan konflik secara kolektif. Ketika terjadi permasalahan terkait pengelolaan ternak maupun tanggung jawab anggota, proses penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan secara informal dan tidak melibatkan seluruh anggota kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan: *"Kalau ada masalah biasanya hanya dibicarakan oleh beberapa orang saja."* (INF-03, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggota merasa tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Akibatnya, konflik yang muncul tidak benar-benar terselesaikan secara kolektif, tetapi justru memunculkan rasa ketidakpercayaan dan prasangka antaranggota. Secara teoritis, interaksi sosial dalam kelompok seharusnya berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kohesivitas, solidaritas, dan kerja sama kolektif. Menurut Tuckman (2001) dinamika kelompok yang sehat ditandai dengan adanya

proses komunikasi terbuka, kemampuan menyelesaikan konflik secara kolektif, dan distribusi peran yang berjalan secara seimbang. Namun dalam penelitian ini, dinamika interaksi justru memperlihatkan pola relasi yang eksklusif dan kurang kolaboratif. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa interaksi kelompok lebih banyak terjadi pada aktivitas teknis rutin seperti penggembalaan ternak atau pencarian pakan, sementara interaksi strategis yang berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok relatif minim. Diskusi mengenai evaluasi usaha, strategi pengembangan pasar, atau pembagian tanggung jawab kelompok jarang dilakukan secara mendalam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok belum berkembang menjadi organisasi pembelajaran (learning organization) yang mampu memfasilitasi proses refleksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Padahal, dalam pendekatan penyuluhan partisipatif, kelompok seharusnya menjadi ruang belajar bersama yang memungkinkan anggota bertukar pengalaman dan membangun solusi secara kolektif (Pretty, 1995). Lebih jauh, lemahnya dinamika interaksi juga berdampak terhadap menurunnya kohesivitas kelompok. Hubungan antaranggota menjadi semakin renggang setelah muncul konflik terkait pengelolaan ternak dan ketidakjelasan tanggung jawab anggota. Hal ini diungkapkan informan yang mengatakan: "Setelah ada masalah di kelompok, anggota jadi jarang berkomunikasi dan lebih fokus sendiri-sendiri." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan kelompok. Penelitian Thornton et al. (2014) menunjukkan bahwa kohesivitas kelompok sangat berkaitan dengan kualitas komunikasi dan rasa saling percaya antaranggota. Ketika komunikasi tidak berjalan secara sehat, maka solidaritas kelompok akan mengalami penurunan.

Dari keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa dinamika interaksi dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa tidak hanya mengalami persoalan teknis komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan struktur relasi sosial, budaya organisasi, dan distribusi kekuasaan dalam kelompok. Interaksi yang tidak dialogis menghasilkan partisipasi semu, memperlemah kohesivitas, dan menghambat terbentuknya rasa memiliki terhadap kelompok. Dengan demikian, rendahnya partisipasi anggota dalam kelompok peternak pada penelitian ini bukan sekadar persoalan motivasi individu, melainkan merupakan konsekuensi dari kegagalan kelompok dalam membangun sistem interaksi sosial yang inklusif, transparan, dan partisipatif. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan kelompok peternak sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi kolektif yang sehat dan kelembagaan sosial yang mampu menciptakan rasa saling percaya antaranggota kelompok.

Bentuk dan Kualitas Partisipasi Anggota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi anggota dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa masih didominasi oleh partisipasi pasif dan partisipasi semu (*pseudo participation*). Keterlibatan anggota lebih banyak terlihat pada aktivitas yang bersifat teknis dan operasional, seperti pencarian pakan, pemberian pakan ternak, pembersihan kandang, dan kehadiran dalam rapat kelompok. Namun demikian, keterlibatan anggota dalam proses strategis, seperti pengambilan keputusan, penyusunan rencana usaha, pengelolaan keuangan, dan evaluasi program, masih sangat terbatas. Sebagian besar anggota hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah kelompok secara kolektif. Hal ini terungkap dari penuturan informan yang mengatakan: "*Saya ikut kegiatan kalau diminta saja, tapi soal keputusan biasanya sudah ditentukan."* (INF-04, Anggota Kurang Aktif, 2025). *"Yang penting hadir waktu rapat atau kerja kelompok, tapi jarang ikut menentukan kebijakan."* (INF-05, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Dominasi pengambilan keputusan oleh ketua kelompok ini mempertegas adanya hambatan komunikasi partisipatif. Dalam kacamata Freire, pola ini mereduksi anggota gurem menjadi sekadar objek program (penerima arahan), alih-alih subjek komunikasi pembangunan yang memiliki hak setara untuk melakukan refleksi dan aksi bersama secara dialogis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota lebih bersifat administratif dan prosedural dibandingkan substantif. Dalam perspektif Typology of Participation, bentuk partisipasi yang terjadi termasuk dalam kategori passive participation dan participation by consultation, yaitu situasi ketika anggota hanya hadir atau dimintai pendapat tanpa memiliki kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan (Pretty, 1995). Penelitian Untari et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi anggota dalam kelompok berkaitan dengan persepsi anggota terhadap peranan kelompok, akses informasi dan pendidikan formalnya. Secara kritis, partisipasi yang terjadi dalam kelompok Balai Ternak Buangsa belum berkembang menjadi partisipasi transformasional yang mampu membangun kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap kelompok. Sebagian anggota masih memandang kelompok sebagai sarana memperoleh bantuan atau fasilitas program, bukan sebagai organisasi kolektif yang memerlukan tanggung jawab bersama. Hal ini terungkap dari penuturan

informan yang mengatakan: “Dulu banyak yang ikut karena berharap dapat bantuan ternak.” (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi partisipasi anggota pada tahap awal lebih bersifat instrumental dan berbasis manfaat ekonomi jangka pendek. Dalam konteks pembangunan partisipatif, kondisi ini sering terjadi pada kelompok yang dibentuk melalui pendekatan proyek (*project-oriented participation*), di mana masyarakat terdorong bergabung karena adanya insentif program, bukan karena kesadaran kolektif untuk membangun organisasi secara berkelanjutan. Menurut Chambers (1994) partisipasi masyarakat yang dibangun secara top-down sering kali hanya menghasilkan keterlibatan semu karena masyarakat belum benar-benar menjadi subjek dalam proses pembangunan. Akibatnya, ketika manfaat ekonomi program mulai menurun, maka tingkat keterlibatan anggota juga ikut menurun. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam dinamika kelompok ketika usaha ternak mengalami penurunan produktivitas dan hasil ekonomi tidak sesuai harapan. Sebagian anggota mulai mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *“Waktu hasil ternak belum terasa, anggota mulai jarang datang.”* (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi anggota memiliki hubungan yang erat dengan persepsi manfaat ekonomi yang diterima. Ketika kelompok belum mampu memberikan hasil ekonomi yang signifikan, maka motivasi anggota untuk berpartisipasi juga mengalami penurunan. Namun demikian, rendahnya partisipasi anggota tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur interaksi dan pola komunikasi kelompok turut berkaitan dengan bentuk dan kualitas partisipasi anggota. Dominasi ketua kelompok dan anggota inti dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan sebagian anggota merasa kurang memiliki ruang untuk terlibat secara aktif. Hal ini terungkap dari pernyataan informan yang mengatakan: “Kadang kami hanya mengikuti saja karena keputusan biasanya sudah dibicarakan duluan.” (INF-03, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang tidak setara dalam kelompok. Dalam perspektif Arnstein's Ladder of Participation, partisipasi yang tidak disertai distribusi kekuasaan yang setara hanya akan menghasilkan tokenism atau partisipasi simbolik (Arnstein, 1969). Anggota memang hadir dalam kegiatan kelompok, tetapi tidak memiliki keterkaitan nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Akibatnya, sebagian anggota mengalami penurunan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kelompok. Mereka merasa bahwa kelompok lebih banyak dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga keterlibatan aktif dianggap tidak terlalu berkaitan dengan arah kelompok. Selain faktor komunikasi dan relasi kekuasaan, bentuk dan kualitas partisipasi anggota juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga anggota. Sebagian besar anggota memiliki pekerjaan utama di luar usaha peternakan, seperti buruh harian, pekerja informal, dan pekerja sektor industri. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *“Kami juga harus kerja harian untuk kebutuhan keluarga, jadi tidak selalu bisa fokus ke kelompok.”* (INF-04, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Tekanan ekonomi rumah tangga menyebabkan usaha ternak kelompok tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian anggota. Dalam konteks masyarakat pedesaan, keterlibatan dalam kelompok sering kali harus berhadapan dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek yang lebih mendesak. Penelitian Mumba et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi peternak dalam organisasi kelompok. Ketika anggota menghadapi tekanan ekonomi, maka keterlibatan dalam kegiatan kolektif cenderung menurun karena anggota lebih fokus pada aktivitas yang dapat memberikan pendapatan langsung. Selain itu, rendahnya kapasitas anggota dalam pengelolaan usaha ternak juga berkaitan dengan kualitas partisipasi. Sebagian anggota belum memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai dalam pengembangan usaha ternak kolektif. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *“Masih banyak anggota yang belum paham soal pengelolaan usaha kelompok.”* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi ini menyebabkan sebagian anggota lebih memilih menyerahkan pengelolaan kelompok kepada ketua atau anggota inti yang dianggap lebih berpengalaman. Akibatnya, partisipasi anggota semakin terbatas pada aktivitas teknis rutin dan tidak berkembang pada aspek pengelolaan strategis kelompok. Dari hasil observasi lapangan, partisipasi anggota juga bersifat fluktuatif. Pada awal program, tingkat kehadiran anggota relatif tinggi karena adanya antusiasme terhadap bantuan dan harapan peningkatan ekonomi. Namun, seiring munculnya konflik internal dan kegagalan produksi ternak, tingkat keterlibatan anggota mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *“Awalnya anggota banyak yang aktif, tapi lama-lama berkurang setelah ada masalah.”* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota sangat berkaitan dengan dinamika sosial kelompok. Ketika konflik muncul dan kepercayaan antaranggota menurun, maka solidaritas kelompok ikut melemah dan partisipasi anggota mengalami penurunan. Dalam perspektif modal sosial, partisipasi kolektif hanya dapat berkembang apabila terdapat rasa saling percaya (social trust), norma kerja sama, dan kohesivitas kelompok yang kuat (Mouritsen, 2003). Dalam kasus Kelompok, lemahnya komunikasi dan konflik internal menyebabkan modal sosial kelompok mengalami erosi sehingga partisipasi anggota semakin menurun. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kelompok juga masih terbatas. Aktivitas kelompok lebih banyak didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan umumnya hanya terlibat secara tidak langsung melalui dukungan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok juga berkaitan dengan struktur sosial dan budaya lokal yang masih menempatkan usaha peternakan sebagai domain laki-laki. Padahal, dalam banyak studi pembangunan pedesaan, keterlibatan perempuan memiliki kontribusi penting terhadap keberlanjutan usaha rumah tangga peternak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi anggota dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa masih berada pada level partisipasi prosedural dan belum berkembang menjadi partisipasi substantif. Rendahnya partisipasi berkaitan dengan kombinasi berbagai faktor, meliputi: ketimpangan relasi kekuasaan dalam kelompok, lemahnya komunikasi dialogis, rendahnya transparansi organisasi, tekanan ekonomi rumah tangga, lemahnya kapasitas anggota, serta menurunnya kepercayaan sosial akibat konflik internal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi anggota tidak dapat dipahami hanya sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan kelompok, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial yang berkaitan dengan kualitas interaksi, distribusi kekuasaan, kapasitas anggota, dan kekuatan kelembagaan kelompok. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan penyuluhan partisipatif sangat bergantung pada kemampuan membangun ruang partisipasi yang inklusif, setara, dan berbasis pemberdayaan sosial anggota kelompok.

Lemahnya Kelembagaan Kelompok dan Tidak Berjalannya Kontrol Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan kegagalan dinamika partisipatif dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa adalah lemahnya sistem kelembagaan kelompok dan tidak berjalannya mekanisme kontrol sosial secara efektif. Kelembagaan kelompok yang seharusnya berfungsi sebagai perangkat pengatur hubungan sosial, distribusi tanggung jawab, dan pengendali perilaku anggota, dalam praktiknya belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Secara struktural, kelompok belum memiliki aturan formal yang jelas dan disepakati bersama terkait hak, kewajiban, pembagian peran, mekanisme pengawasan, maupun sistem sanksi terhadap anggota yang tidak menjalankan tanggung jawab kelompok. Sebagian besar aturan hanya bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara tertulis. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Tidak ada aturan tertulis yang benar-benar jelas. Jadi semuanya lebih berdasarkan kesepakatan lisan saja."* (INF-01, Ketua Kelompok, 2025). *"Kalau ada anggota yang tidak aktif atau bermasalah, biasanya tidak ada tindakan yang tegas."* (INF-04, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok masih berada pada level kelembagaan informal yang lemah (*weak informal institution*). Dalam perspektif kelembagaan yang dikemukakan Ostrom (1990), keberhasilan organisasi berbasis komunitas sangat ditentukan oleh keberadaan aturan bersama (*collective-choice arrangements*), sistem monitoring, serta mekanisme sanksi yang disusun dan disepakati secara kolektif oleh anggota kelompok. Menurut Ostrom (1990), kelembagaan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi secara administratif, tetapi juga mencakup kemampuan kelompok dalam menciptakan kepatuhan sosial melalui aturan yang legitimate dan diterima oleh anggota. Dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, aturan kelompok belum berkembang menjadi norma kolektif yang mengikat perilaku anggota. Akibatnya, kelompok tidak memiliki instrumen sosial yang cukup kuat untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab anggota. Lemahnya kelembagaan tersebut terlihat jelas dalam pengelolaan usaha ternak kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan:

> *"Tidak adanya pembagian tugas yang jelas menyebabkan sebagian besar tanggung jawab operasional kelompok hanya dijalankan oleh ketua kelompok dan beberapa anggota inti. "Yang aktif mengurus kelompok biasanya orang yang sama terus." (INF-08, Pendamping Program, 2025)*

"Ada anggota yang jarang ikut kerja, tapi tidak ada aturan yang mengatur itu." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Sentralisasi peran pada figur ketua mencerminkan bahwa aturan kelompok tidak dibangun di atas landasan tindakan komunikatif yang setara. Tanpa dialog inklusif untuk menyepakati aturan pembagian kerja, kesepakatan yang lahir hanyalah aturan informal yang rapuh karena tidak didasari oleh pemahaman intersubjektif (intersubjective understanding). Ketimpangan distribusi tanggung jawab tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dalam kelompok. Anggota yang aktif merasa terbebani, sementara anggota yang kurang aktif tidak mendapatkan konsekuensi sosial yang jelas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menyebabkan menurunnya motivasi anggota inti dan memperlemah solidaritas kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok mengalami kegagalan dalam membangun mekanisme kontrol sosial internal. Dalam organisasi berbasis komunitas, kontrol sosial berfungsi menjaga kepatuhan anggota terhadap norma dan tanggung jawab kolektif melalui tekanan sosial, pengawasan bersama, dan sistem sanksi sosial (Mouritsen, 2003). Ketika kontrol sosial tidak berjalan, maka perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) cenderung meningkat. Hal tersebut terlihat dari munculnya perilaku anggota yang mulai mengabaikan tanggung jawab kelompok, seperti ketidakhadiran dalam kegiatan kelompok, rendahnya kontribusi tenaga kerja, dan lemahnya komitmen terhadap pengelolaan ternak bersama. Hal ini terungkap dari penuturan informan yang mengatakan: "Kadang ada anggota yang tidak datang saat kerja kelompok, tapi tetap merasa punya hak yang sama." (INF-02, Anggota Aktif, 2025) Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok belum mampu membangun norma kolektif mengenai tanggung jawab dan keadilan kerja dalam organisasi. Akibatnya, solidaritas kelompok menjadi semakin lemah karena muncul persepsi ketidaksetaraan kontribusi antaranggota.

Selain itu, lemahnya kelembagaan juga menyebabkan kelompok tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Ketika terjadi masalah terkait pengelolaan ternak dan tanggung jawab anggota, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan secara personal dan informal tanpa prosedur organisasi yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kalau ada masalah biasanya hanya dibicarakan oleh beberapa orang saja, tidak pernah benar-benar dibahas bersama."* (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Akibatnya, konflik yang muncul tidak terselesaikan secara kolektif, tetapi justru berkembang menjadi prasangka dan ketidakpercayaan antaranggota. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut memicu anggota memilih keluar dari kelompok. Hal ini dituturkan oleh informan yang mengatakan: *"Beberapa anggota keluar karena merasa kecewa dan tidak ada penyelesaian yang jelas."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok belum mampu menjalankan fungsi mediasi sosial dalam menyelesaikan konflik internal. Padahal, menurut Putnam, 1993, keberadaan norma bersama dan kepercayaan sosial merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi berbasis komunitas (Mouritsen, 2003).

Menurunnya tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) dalam kelompok menjadi indikator penting dari melemahnya kelembagaan. Ketika anggota mulai merasa bahwa aturan tidak berjalan secara adil dan tidak ada kepastian dalam penyelesaian masalah, maka kepercayaan terhadap organisasi kelompok ikut menurun. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Setelah ada masalah ternak hilang, anggota jadi saling curiga."* (Informan Anggota, 2025)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial tidak hanya berdampak pada aspek organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas relasi sosial antaranggota kelompok. Ketika rasa saling percaya menurun, maka kerja sama kolektif menjadi sulit dipertahankan. Dalam perspektif modal sosial, organisasi komunitas hanya dapat bertahan apabila memiliki: norma bersama yang kuat, rasa saling percaya, jaringan sosial yang aktif, dan mekanisme kerja sama yang adil (Mouritsen, 2003). Namun, dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, elemen-elemen tersebut mengalami pelemahan secara bertahap akibat lemahnya kelembagaan dan tidak berjalannya kontrol sosial. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan kelompok juga berkaitan dengan pendekatan pendampingan yang lebih fokus pada aspek teknis produksi dibandingkan pembangunan organisasi kelompok. Program pendampingan lebih banyak menekankan pada pengembangan usaha ternak, sementara penguatan aturan kelompok, kapasitas organisasi, dan mekanisme pengawasan sosial belum menjadi prioritas utama. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Pendampingan lebih

banyak fokus ke ternak dan pemasaran, sedangkan penguatan organisasi kelompok belum terlalu kuat." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan kelompok belum diposisikan sebagai bagian utama dalam proses penyuluhan. Padahal, menurut Long (2003) keberhasilan pembangunan pedesaan sangat berkaitan dengan kemampuan membangun kelembagaan lokal yang mampu mengelola relasi sosial dan tindakan kolektif masyarakat. Lemahnya kelembagaan juga terlihat dari tidak berkembangnya sistem regenerasi kepemimpinan dalam kelompok. Posisi ketua kelompok menjadi terlalu sentral sehingga sebagian besar aktivitas organisasi bergantung pada figur tertentu. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Kalau ketua tidak aktif, kegiatan kelompok biasanya ikut berhenti." (INF-02, Anggota Aktif, 2025) Ketergantungan terhadap figur tertentu menunjukkan bahwa organisasi kelompok belum berkembang menjadi kelembagaan kolektif yang mandiri. Dalam organisasi yang sehat, fungsi organisasi tidak boleh bergantung hanya pada satu individu, tetapi harus didukung oleh distribusi peran dan tanggung jawab yang berjalan secara kolektif (Ambarwati, 2021). Secara lebih luas, lemahnya kelembagaan kelompok juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya pendidikan organisasi, dan minimnya pengalaman dalam pengelolaan usaha kolektif. Sebagian anggota belum terbiasa dengan sistem organisasi yang membutuhkan disiplin administratif, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks tersebut, kegagalan kelompok bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi merupakan konsekuensi dari belum terbentuknya sistem kelembagaan yang mampu mengatur tindakan kolektif secara efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan kelompok dan tidak berjalannya kontrol sosial menjadi akar penting dari menurunnya partisipasi anggota, meningkatnya konflik internal, dan melemahnya keberlanjutan kelompok peternak. Kelembagaan kelompok yang lemah menyebabkan: tidak adanya kepastian aturan, lemahnya distribusi tanggung jawab, tidak berjalannya sistem pengawasan sosial, meningkatnya perilaku oportunistik, serta menurunnya rasa saling percaya antaranggota. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan kelompok peternak tidak hanya bergantung pada bantuan teknis dan ekonomi, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kelembagaan lokal yang kuat, partisipatif, dan berbasis norma sosial kolektif. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan ke depan perlu lebih menekankan penguatan kapasitas organisasi, pembangunan norma kolektif, dan pengembangan mekanisme kontrol sosial sebagai fondasi utama keberlanjutan kelompok peternak.

Konflik Internal dan Menurunnya Kepercayaan Antaranggota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal menjadi salah satu titik krisis paling penting yang mempercepat melemahnya dinamika kelompok dan menurunkan keberlanjutan Kelompok Balai Ternak Buangsa. Konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengelolaan ternak, tetapi berkembang menjadi krisis sosial yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, kohesivitas kelompok, dan tingkat kepercayaan antaranggota. Pada tahap awal pembentukan kelompok, hubungan antaranggota relatif berjalan baik karena masih terdapat optimisme terhadap manfaat ekonomi program. Namun, seiring munculnya berbagai persoalan dalam pengelolaan ternak dan distribusi tanggung jawab kelompok, mulai muncul ketegangan sosial di antara anggota. Salah satu konflik utama yang menjadi titik balik penurunan kohesivitas kelompok adalah kasus hilangnya ternak yang memunculkan rasa saling curiga antaranggota. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Setelah ada ternak yang hilang, suasana kelompok berubah. Anggota jadi saling curiga." (INF-06, Mantan Anggota, 2025)

"Masalah itu membuat hubungan antaranggota tidak lagi nyaman seperti sebelumnya." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kasus tersebut tidak hanya dipandang sebagai kerugian ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan kolektif yang telah dibangun dalam kelompok. Dalam organisasi berbasis komunitas, ternak kelompok tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kerja sama dan tanggung jawab bersama. Ketika muncul kehilangan ternak dan tidak ada penyelesaian yang jelas, maka kepercayaan sosial antaranggota mengalami erosi secara signifikan.

Dalam perspektif Putnam (1993), kepercayaan (*trust*) merupakan elemen utama modal sosial (*social capital*) yang memungkinkan terbentuknya kerja sama kolektif dalam organisasi masyarakat (Mouritsen, 2003). Kepercayaan sosial berfungsi mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sosial dan membangun keyakinan bahwa setiap anggota akan menjalankan tanggung jawab secara adil.

Namun dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, lemahnya kelembagaan dan tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik menyebabkan masalah yang muncul berkembang menjadi ketidakpercayaan kolektif. Anggota mulai mempertanyakan integritas sebagian anggota lain dan meragukan transparansi pengelolaan kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Ada anggota yang mulai merasa tidak percaya lagi dengan pengelolaan kelompok."* (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Menurunnya tingkat kepercayaan tersebut menyebabkan hubungan sosial antaranggota menjadi semakin renggang. Interaksi yang sebelumnya relatif terbuka berubah menjadi lebih tertutup dan penuh kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Setelah ada masalah, anggota jadi jarang berkomunikasi dan lebih fokus sendiri-sendiri."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik internal tidak hanya berdampak pada aspek organisasi, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial dalam kelompok. Ketika rasa saling percaya menurun, maka solidaritas kelompok ikut melemah dan anggota mulai mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan kolektif. Dalam perspektif sosiologi organisasi, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya social fragmentation, yaitu melemahnya keterikatan sosial akibat hilangnya kepercayaan dan norma kerja sama dalam kelompok. Menurut Durkheim (2018) kohesi sosial dalam kelompok hanya dapat bertahan apabila terdapat solidaritas dan kesadaran kolektif yang kuat antaranggota. Ketika solidaritas melemah, maka organisasi menjadi rentan mengalami disintegrasi.

Konflik internal dalam kelompok juga diperparah oleh tidak adanya mekanisme mediasi dan penyelesaian konflik yang berjalan secara terbuka dan partisipatif. Permasalahan yang muncul lebih banyak dibicarakan secara informal oleh beberapa anggota inti tanpa melibatkan seluruh anggota kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Kalau ada masalah biasanya hanya dibicarakan oleh beberapa orang saja." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Akibatnya, sebagian anggota merasa tidak memperoleh ruang yang adil dalam proses penyelesaian masalah. Situasi tersebut memunculkan prasangka, gosip internal, dan polarisasi hubungan antaranggota. Dalam konteks kelompok berbasis komunitas, konflik yang tidak diselesaikan secara terbuka cenderung berkembang menjadi konflik laten (*latent conflict*), yaitu konflik yang tidak tampak secara langsung tetapi terus berkaitan dengan hubungan sosial anggota. Konflik laten berbahaya karena perlahan-lahan merusak kohesivitas kelompok dan menurunkan kualitas komunikasi interpersonal. Penelitian Thornton et al. (2014) menunjukkan bahwa kohesivitas kelompok sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi terbuka dan menyelesaikan konflik secara kolektif. Ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka rasa saling percaya akan mengalami penurunan secara bertahap. Selain itu, konflik internal juga memunculkan ketimpangan emosional dalam kelompok. Anggota yang merasa bekerja lebih keras mulai mengalami kejenuhan dan kekecewaan terhadap anggota lain yang dianggap kurang bertanggung jawab. Hal ini dituturkan oleh informan yang mengatakan: "Ada rasa kecewa karena yang aktif hanya orang tertentu saja." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Ketimpangan kontribusi tersebut menyebabkan munculnya persepsi ketidakadilan dalam kelompok. Dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), individu cenderung mempertahankan hubungan sosial apabila terdapat keseimbangan antara kontribusi dan manfaat yang diterima (Mighfar, 2015). Ketika anggota merasa kontribusinya tidak dihargai secara adil, maka komitmen terhadap kelompok akan menurun. Kondisi tersebut terlihat dari mulai menurunnya keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok setelah konflik internal semakin membesar. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Setelah banyak masalah, anggota mulai malas ikut kegiatan."* (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik sosial memiliki hubungan langsung terhadap bentuk dan kualitas partisipasi anggota. Semakin rendah tingkat kepercayaan antaranggota, maka semakin rendah pula motivasi untuk terlibat dalam aktivitas kolektif kelompok. Konflik internal juga menyebabkan menurunnya legitimasi kepemimpinan kelompok. Sebagian anggota mulai meragukan kemampuan pengurus dalam mengelola kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Hal ini diungkapkan informan yang mengatakan: "Ada anggota yang merasa pengurus kurang tegas dalam menyelesaikan masalah." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik yang tidak terselesaikan bukan hanya merusak hubungan horizontal antaranggota, tetapi juga berkaitan dengan hubungan vertikal antara anggota dan pengurus kelompok. Selain berdampak terhadap dinamika internal, menurunnya kepercayaan sosial

juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha kelompok secara ekonomi. Ketika hubungan antaranggota memburuk, koordinasi dalam pengelolaan ternak menjadi semakin lemah. Sebagian anggota mulai lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok. Hal ini diungkapkan informan yang mengatakan: "Setelah konflik muncul, kerja sama jadi semakin sulit." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Dalam konteks organisasi kolektif, kerja sama ekonomi sangat bergantung pada kualitas hubungan sosial antaranggota. Ketika kepercayaan menurun, maka biaya sosial dalam organisasi meningkat karena setiap anggota menjadi lebih berhati-hati dan defensif terhadap anggota lain. Penelitian Francis Fukuyama menjelaskan bahwa masyarakat atau organisasi dengan tingkat kepercayaan rendah cenderung mengalami kesulitan membangun kerja sama kolektif dan keberlanjutan kelembagaan (Fukuyama, 1996) Dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, rendahnya kepercayaan sosial menyebabkan kemampuan kelompok dalam mempertahankan tindakan kolektif semakin melemah. Lebih jauh, konflik internal juga berdampak terhadap menurunnya identitas kolektif kelompok. Pada awal pembentukan, anggota masih memiliki semangat bersama untuk mengembangkan usaha ternak kelompok. Namun, setelah konflik berkembang, orientasi anggota mulai bergeser menjadi lebih individualistis. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Sekarang anggota lebih fokus mengurus ternaknya masing-masing.*" (INF-07, Mantan Anggota, 2025)

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari orientasi kolektif menuju orientasi individual. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menyebabkan kelompok kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang kerja sama dan pembelajaran bersama. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal dan menurunnya kepercayaan antaranggota bukan sekadar persoalan interpersonal, tetapi merupakan konsekuensi dari lemahnya kelembagaan, tidak berjalannya kontrol sosial, dan buruknya kualitas komunikasi dalam kelompok. Konflik yang tidak terselesaikan secara partisipatif menyebabkan: menurunnya kohesivitas kelompok, melemahnya solidaritas sosial, berkurangnya partisipasi anggota, meningkatnya sikap individualistis, serta menurunnya keberlanjutan organisasi kelompok. Temuan ini mempertegas bahwa kepercayaan sosial merupakan fondasi utama dalam keberhasilan kelompok peternak berbasis komunitas. Tanpa adanya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, maka kelompok akan sulit mempertahankan tindakan kolektif dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan ke depan perlu lebih menekankan penguatan modal sosial, pembangunan komunikasi dialogis, dan pengembangan mekanisme resolusi konflik sebagai bagian penting dalam penguatan kelembagaan kelompok peternak.

Kegagalan Produksi dan Tekanan Ekonomi terhadap Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan produksi dan tekanan ekonomi rumah tangga menjadi faktor penting yang mempercepat menurunnya partisipasi anggota dalam Kelompok Balai Ternak Buangsa. Permasalahan ekonomi tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha ternak secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan motivasi, komitmen sosial, dan kualitas relasi antaranggota kelompok. Dalam konteks kelompok peternak, keberhasilan ekonomi memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar legitimasi kelompok sebagai wadah kolektif (Fathurohman et al., 2025; Roslinda, 2025). Pada tahap awal pembentukan kelompok, sebagian besar anggota memiliki harapan besar bahwa usaha ternak kelompok mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Awalnya kami berharap ternak ini bisa membantu ekonomi keluarga." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Harapan tersebut menjadi motivasi utama anggota untuk bergabung dan terlibat dalam kegiatan kelompok. Namun dalam perkembangannya, kelompok menghadapi berbagai kendala produksi yang menyebabkan target usaha ternak tidak tercapai secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya performa penggemukan ternak menjelang momentum Idul Adha yang seharusnya menjadi periode utama pemasaran ternak dengan harga tinggi. Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional, keterbatasan kualitas pakan, dan rendahnya kapasitas teknis anggota menyebabkan pertumbuhan ternak tidak sesuai target pasar. Hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan: *"Target panen waktu Idul Adha tidak tercapai karena bobot ternak belum memenuhi standar."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kegagalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis peternakan, tetapi juga sebagai kegagalan kolektif kelompok dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang dijanjikan sejak awal program. Dalam konteks kelompok berbasis komunitas, manfaat ekonomi memiliki fungsi penting

sebagai pengikat solidaritas dan partisipasi anggota. Ketika manfaat ekonomi tidak tercapai, maka legitimasi kelompok ikut melemah. Penelitian Mumba et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi kelompok ternak memiliki hubungan langsung terhadap keberlanjutan partisipasi anggota. Peternak cenderung mempertahankan keterlibatan mereka dalam organisasi apabila kelompok mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan stabil. Dalam kasus Kelompok Balai Ternak Buangsa, kegagalan produksi menyebabkan munculnya rasa kecewa dan penurunan optimisme anggota terhadap masa depan kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Kami sudah lama memelihara ternak, tapi hasilnya belum sesuai harapan." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota sangat berkaitan dengan persepsi terhadap keberhasilan ekonomi kelompok. Ketika hasil usaha tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, maka motivasi anggota untuk terlibat aktif mulai menurun. Tekanan ekonomi rumah tangga menjadi faktor yang semakin memperburuk kondisi tersebut. Sebagian besar anggota kelompok berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pekerjaan harian maupun sektor informal. Hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan: "Kalau kebutuhan rumah tangga mendesak, kami terpaksa mencari pekerjaan lain dulu." (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, anggota cenderung memprioritaskan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan pendapatan cepat dan pasti dibandingkan terlibat dalam usaha ternak kelompok yang hasilnya bersifat jangka panjang dan penuh ketidakpastian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi anggota dalam kelompok tidak dapat dilepaskan dari strategi bertahan hidup rumah tangga (*household survival strategy*). Menurut Scott (1977) masyarakat pedesaan miskin cenderung menghindari aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi dan lebih memilih strategi yang mampu menjamin keamanan ekonomi jangka pendek (*safety first principle*). Dalam konteks penelitian ini, usaha ternak kelompok dipandang sebagai aktivitas yang membutuhkan waktu lama, tenaga besar, dan hasil yang belum pasti. Akibat tekanan ekonomi tersebut, sebagian anggota mulai mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok. Kehadiran anggota dalam rapat dan aktivitas kolektif semakin menurun, terutama ketika kelompok mulai mengalami kerugian produksi. Hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan: "Waktu hasil ternak tidak bagus, anggota mulai jarang datang." (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Penurunan partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi berfungsi sebagai sumber energi sosial dalam kelompok. Ketika kelompok mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, maka solidaritas dan semangat kolektif cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika kelompok mengalami kegagalan ekonomi, maka hubungan sosial dalam kelompok ikut melemah. Selain itu, tekanan ekonomi juga menyebabkan munculnya keputusan-keputusan pragmatis yang justru memperlemah keberlanjutan usaha kelompok. Dalam beberapa kasus, anggota memilih menjual ternak lebih cepat kepada tengkulak meskipun dengan harga yang lebih rendah karena kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Karena butuh uang cepat, akhirnya ternak dijual sebelum waktunya."* (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya benturan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek rumah tangga dengan tujuan jangka panjang pengembangan usaha kelompok. Dalam perspektif ekonomi pedesaan, kondisi ini sering terjadi pada masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi, di mana keputusan ekonomi lebih didorong oleh kebutuhan survival dibandingkan pertimbangan pengembangan usaha jangka panjang. Kondisi ekonomi kelompok juga diperburuk oleh lemahnya sistem manajemen usaha dan minimnya diversifikasi sumber pendapatan kelompok. Aktivitas ekonomi kelompok masih sangat bergantung pada penjualan ternak hidup, sehingga ketika produksi ternak gagal memenuhi standar pasar, kelompok tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kalau ternak tidak laku, kelompok langsung kesulitan di dalam mencari alternatif penjualannya."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan menyebabkan kelompok memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Dalam konteks usaha peternakan rakyat menurut Irma et al. (2025) diversifikasi usaha menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kelompok dan mengurangi risiko usaha. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan ekonomi juga berdampak terhadap hubungan sosial antaranggota. Ketika keuntungan ekonomi tidak tercapai, sebagian anggota mulai mempertanyakan efektivitas pengelolaan kelompok dan kontribusi anggota lain. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Ada anggota yang merasa sudah capek bekerja, tapi hasilnya tidak sebanding."* (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut memunculkan rasa frustrasi dan ketidakadilan dalam kelompok. Anggota yang merasa lebih aktif mulai mengalami kejenuhan karena menganggap beban kerja tidak dibagi secara seimbang. Dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), individu akan mempertahankan keterlibatan dalam organisasi apabila terdapat keseimbangan antara kontribusi dan manfaat yang diterima. Ketika anggota merasa pengorbanannya tidak menghasilkan manfaat yang layak, maka komitmen terhadap kelompok akan menurun. Kegagalan produksi juga berdampak terhadap menurunnya legitimasi kepemimpinan kelompok dan pendamping program. Sebagian anggota mulai meragukan kemampuan kelompok dalam mencapai tujuan ekonomi yang dijanjikan. Hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan: *"Awalnya yakin kelompok bisa berkembang, tapi lama-lama anggota mulai ragu."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial dalam membangun kepercayaan anggota terhadap organisasi kelompok. Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menyebabkan sebagian anggota mulai kembali berorientasi pada usaha individual dibandingkan usaha kolektif kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Sekarang anggota lebih fokus mencari penghasilan sendiri."* (INF-07, Mantan Anggota, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi dari kerja sama kolektif menuju strategi ekonomi individual. Ketika kelompok tidak mampu memberikan jaminan manfaat ekonomi, maka anggota cenderung menarik diri dari aktivitas kolektif dan kembali mengandalkan strategi ekonomi rumah tangga masing-masing. Dalam konteks pembangunan kelompok berbasis komunitas, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan partisipasi sangat berkaitan dengan kemampuan kelompok dalam menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan solidaritas social (Wahib & Susanto, 2024; Sayuti et al. 2024). Partisipasi tidak dapat dipertahankan hanya melalui pendekatan normatif atau moral kolektif, tetapi membutuhkan dukungan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota kelompok.

Penelitian Sen (1999) menegaskan bahwa kemiskinan dan keterbatasan ekonomi dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan secara aktif. Ketika masyarakat berada dalam tekanan ekonomi tinggi, maka prioritas utama mereka adalah mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga, bukan membangun partisipasi kolektif jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan produksi dan tekanan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat besar terhadap menurunnya partisipasi anggota kelompok peternak. Kegagalan ekonomi menyebabkan: menurunnya motivasi anggota, melemahnya solidaritas kelompok, meningkatnya orientasi individual, berkurangnya keterlibatan anggota dalam kegiatan kolektif, serta menurunnya legitimasi kelompok sebagai wadah usaha bersama. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan kelompok peternak tidak hanya ditentukan oleh aspek sosial dan kelembagaan, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan kelompok dalam menciptakan manfaat ekonomi yang nyata, stabil, dan berkelanjutan bagi anggota. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan dan pengembangan kelompok peternak perlu mengintegrasikan penguatan kelembagaan sosial dengan strategi penguatan ekonomi rumah tangga agar partisipasi anggota dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Peran Pendamping dan Keterbatasan Pendekatan Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Kelompok Balai Ternak Buangsa, terutama pada fase awal pembentukan dan pengembangan usaha kelompok. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi teknis peternakan, tetapi juga menjadi penghubung antara program dengan anggota kelompok, fasilitator kegiatan usaha, serta mediator dalam berbagai persoalan kelompok. Gambaran dinamika penyuluhan pertanian di Kabupaten Subang dari hasil penelitian Siregar & Saridewi (2010) menunjukkan sebagian besar penyuluh bekerja karena kebutuhan untuk berpretasi, hanya sebagian kecil karena kebutuhan afiliasi dan jabatan atau kekuasaan. Artinya para penyuluh relatif memiliki motivasi yang baik di dalam bekerjanya.

Dalam praktiknya, pendamping telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan aktivitas kelompok, seperti memberikan pelatihan teknis pemeliharaan ternak, membantu pengembangan strategi pemasaran, memfasilitasi diskusi kelompok, hingga mendorong inovasi usaha melalui paket akikah dan domba guling. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Pendamping banyak membantu, mulai dari cara pemeliharaan sampai membantu mencari pasar."* (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

"Kalau tidak ada pendamping, mungkin kelompok sudah lama berhenti." (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pendamping memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas kelompok. Dalam konteks penyuluhan pertanian, pendamping memang memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan (*change agent*) yang berfungsi mendorong proses pembelajaran, inovasi, dan penguatan kapasitas masyarakat (Rogers, 2003).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pendamping telah menjalankan berbagai fungsi teknis dan fasilitatif, intervensi penyuluhan yang dilakukan belum mampu mengatasi akar persoalan sosial dan kelembagaan kelompok secara mendalam. Pendekatan penyuluhan masih cenderung berfokus pada aspek teknis produksi dan pengembangan usaha ekonomi, sementara dimensi relasi sosial, distribusi kekuasaan, konflik internal, dan penguatan kelembagaan kelompok belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Pendampingan lebih banyak fokus ke ternak dan pemasaran, sedangkan masalah hubungan antaranggota belum terlalu terselesaikan."* (INF-03, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan penyuluhan yang masih bersifat teknokratis dan berorientasi pada peningkatan produksi. Hasil penelitian Listiana et al. (2018) menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang teknokratis cenderung kurang menguatkan kapasitas penyuluh, sehingga kepuasan petani terhadap penyuluhan menjadi rendah. Dalam banyak program pembangunan pertanian, keberhasilan sering kali diukur melalui indikator teknis dan ekonomi, seperti peningkatan populasi ternak, produksi, atau pemasaran, sementara aspek sosial dan kelembagaan kelompok kurang menjadi fokus utama. Padahal, dalam pendekatan penyuluhan partisipatif, keberhasilan kelompok tidak hanya ditentukan oleh transfer teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dialogis, solidaritas sosial, dan kapasitas organisasi kelompok (Pretty, 1995) Ketika penyuluhan hanya menekankan aspek teknis, maka persoalan sosial yang menjadi akar lemahnya partisipasi kelompok sering kali tidak terselesaikan (Ramadwika, 2025). Fenomena tersebut terlihat dalam dinamika Kelompok Balai Ternak Buangsa. Pendamping mampu membantu kelompok dalam aspek teknis pemeliharaan dan pemasaran ternak, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun partisipasi substantif anggota maupun memperkuat sistem kelembagaan kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Pendamping sudah membantu banyak, tapi anggota tetap belum terlalu aktif."* (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan teknis tidak secara otomatis menghasilkan penguatan sosial kelompok. Dalam konteks ini, partisipasi anggota ternyata tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pengetahuan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas relasi sosial dan rasa memiliki terhadap kelompok (Musabbikhin, 2020). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara pendamping dan kelompok masih cenderung bersifat top-down pada beberapa aspek tertentu. Meskipun pendamping berusaha melibatkan anggota dalam kegiatan kelompok, sebagian besar inisiatif program dan strategi usaha masih banyak diarahkan oleh pendamping. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Kadang kami hanya mengikuti arahan dari pendamping." (INF-03, Anggota Aktif, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggota kelompok belum sepenuhnya berkembang menjadi aktor yang mandiri dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Freire (1970) pendekatan pemberdayaan seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*), bukan sekadar penerima arahan program. Keterbatasan pendamping ini berakar dari dominasi tindakan instrumental-teknokratis yang bias paradigma transfer teknologi (*technology transfer*). Dengan mengabaikan aspek relasi sosial kelompok, pendamping terjebak pada penyuluhan instruktif 'gaya bank' yang *top-down*. Untuk itu, pendamping harus mengeliminasi hambatan komunikasi partisipatif dengan bergeser ke arah fasilitasi sosial (*social facilitation*) guna menumbuhkan kemandirian kolektif peternak."

Ketergantungan kelompok terhadap pendamping juga terlihat dalam keberlangsungan aktivitas organisasi. Ketika intensitas pendampingan menurun, aktivitas kelompok ikut mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kalau pendamping jarang datang, kegiatan kelompok biasanya ikut berkurang."* (INF-03, Anggota Aktif, 2025) Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan kelompok belum berkembang secara mandiri. Kelompok masih bergantung pada figur eksternal dalam menjalankan aktivitas organisasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, ketergantungan seperti ini menjadi indikator bahwa proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Menurut Chambers (1994), tujuan utama pembangunan partisipatif adalah membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola perubahan

secara mandiri. Ketika kelompok masih sangat bergantung pada pendamping, maka keberlanjutan organisasi menjadi rentan ketika intervensi eksternal berkurang. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping menghadapi keterbatasan struktural dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pendamping lebih banyak dituntut mencapai target program yang bersifat administratif dan ekonomi dibandingkan melakukan penguatan sosial kelompok secara mendalam. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kadang fokus program memang lebih banyak ke target usaha dan perkembangan ternak."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem program penyuluhan masih cenderung menempatkan keberhasilan dalam kerangka output teknis dibandingkan transformasi sosial kelompok. Akibatnya, pendamping lebih banyak mengalokasikan waktu untuk aspek produksi dan pemasaran dibandingkan penguatan komunikasi kelompok, penyelesaian konflik, dan pembangunan norma kolektif. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Tran et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan di banyak negara berkembang masih cenderung bersifat *top-down* dan teknosentris, sehingga kurang efektif dalam membangun partisipasi substantif dan kemandirian kelompok tani maupun peternak. Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik interpersonal yang telah berkembang menjadi ketidakpercayaan sosial antaranggota. Ketika konflik internal muncul, kapasitas pendamping dalam melakukan mediasi sosial masih terbatas. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Pendamping mencoba membantu menyelesaikan masalah, tapi anggota sudah terlanjur saling curiga."* (INF-03, Anggota Aktif, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan teknis tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sosial yang bersifat emosional dan relasional. Konflik sosial membutuhkan pendekatan mediasi, komunikasi dialogis, dan pembangunan kembali kepercayaan antaranggota kelompok. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, keberhasilan pendampingan sangat berkaitan dengan kemampuan penyuluh membangun social facilitation, yaitu kemampuan memfasilitasi interaksi sosial, membangun solidaritas, dan memperkuat kapasitas kolektif masyarakat (Long, 2003; Sadono, 2008). Namun dalam praktiknya, kompetensi penyuluhan sering kali lebih berfokus pada transfer teknologi dibandingkan penguatan dinamika sosial kelompok. Penelitian Sugiarto et al. (2019) menunjukkan bahwa kebutuhan penyuluhan bagi peternak kecil tidak hanya sebatas dalam aspek teknis semata, melainkan harus juga memperhatikan aspek sosial dan emosional peternak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadapi tantangan besar dalam membangun regenerasi anggota kelompok. Rendahnya minat generasi muda terhadap usaha peternakan menyebabkan kelompok kesulitan memperoleh anggota baru yang lebih produktif. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: "Anak muda lebih tertarik kerja di pabrik daripada ikut beternak." (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan peternakan menghadapi tantangan struktural yang lebih luas, yaitu perubahan orientasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam situasi tersebut, pendamping tidak hanya dituntut meningkatkan kapasitas teknis peternak, tetapi juga harus mampu membangun daya tarik sosial dan ekonomi usaha peternakan bagi generasi muda. Secara kritis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan pendekatan penyuluhan dalam kelompok peternak bukan semata-mata disebabkan oleh kapasitas individu pendamping, tetapi juga berkaitan dengan paradigma pembangunan yang masih terlalu berorientasi pada peningkatan produksi dan target program jangka pendek. Pendekatan penyuluhan yang terlalu teknokratis menyebabkan dimensi sosial, relasi kekuasaan, konflik, dan kelembagaan kelompok kurang mendapat perhatian yang memadai (Burris, 1989; Friedman, 2019). Akibatnya, program mampu meningkatkan aktivitas teknis kelompok dalam jangka pendek, tetapi belum berhasil membangun fondasi sosial dan kelembagaan yang kuat untuk keberlanjutan kelompok dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping memiliki kontribusi penting dalam mempertahankan aktivitas kelompok, tetapi efektivitas penyuluhan masih dibatasi oleh: pendekatan yang terlalu berorientasi teknis, lemahnya penguatan kelembagaan sosial, keterbatasan fasilitasi komunikasi partisipatif, belum optimalnya mediasi konflik kelompok, serta tingginya ketergantungan kelompok terhadap pendamping eksternal. Temuan ini mempertegas bahwa penyuluhan peternakan ke depan perlu bergeser dari paradigma transfer teknologi menuju pendekatan pemberdayaan sosial yang lebih partisipatif, dialogis, dan berbasis penguatan kelembagaan komunitas. Penyuluh tidak cukup hanya berperan sebagai penyampai inovasi teknis, tetapi juga harus menjadi fasilitator sosial yang mampu membangun kepercayaan, solidaritas, dan kapasitas kolektif kelompok peternak secara berkelanjutan (Leeuwis, 2013; Prajapati et al., 2025 ; Wesley et al., 2025)

Tantangan Regenerasi dan Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Pedesaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan regenerasi peternak muda dan perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan merupakan persoalan struktural yang secara signifikan berkaitan dengan keberlanjutan Kelompok Balai Ternak Buangsa. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan menurunnya jumlah anggota produktif dalam kelompok, tetapi juga mencerminkan terjadinya transformasi orientasi ekonomi masyarakat pedesaan yang semakin menjauh dari sektor peternakan rakyat berbasis komunitas. Secara demografis, sebagian besar anggota aktif kelompok berada pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Keterlibatan generasi muda dalam aktivitas kelompok sangat terbatas dan cenderung bersifat temporer. Kondisi ini menyebabkan kelompok mengalami kekurangan tenaga kerja produktif yang mampu menjalankan aktivitas usaha ternak secara intensif dan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Yang masih aktif kebanyakan sudah berumur. Anak muda jarang yang mau ikut"* (Informan Anggota). *"Kalau mencari rumput atau mengurus ternak setiap hari sekarang semakin berat karena anggota yang muda hampir tidak ada"* (INF-01, Ketua Kelompok, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok peternak sedang menghadapi krisis regenerasi. Dalam konteks usaha peternakan rakyat, regenerasi tidak hanya berarti pergantian usia anggota, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pengetahuan lokal, pengalaman beternak, dan kapasitas kolektif kelompok dalam mempertahankan usaha ternak berbasis komunitas.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor peternakan tidak lagi dipandang sebagai pilihan pekerjaan yang menarik bagi generasi muda pedesaan. Sebagian besar pemuda di wilayah penelitian lebih memilih bekerja di sektor industri, jasa, atau pekerjaan informal di perkotaan dibandingkan terlibat dalam usaha peternakan kelompok. Hal ini terungkap dari perkataan informan yang mengatakan: *"Anak muda sekarang lebih memilih kerja di pabrik karena gajinya jelas setiap bulan"* (INF-07, Mantan Anggota, 2025).*"Kalau beternak dianggap capek, hasilnya lama, dan belum tentu berhasil."* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan orientasi ekonomi masyarakat pedesaan dari sektor agraris menuju sektor industri dan non-pertanian. Dalam perspektif transformasi pedesaan (*rural transformation*), fenomena ini merupakan bagian dari perubahan struktur ekonomi masyarakat akibat industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi ekonomi pedesaan. Menurut Van der Ploeg (2017) modernisasi pedesaan telah menyebabkan terjadinya *deagrarianization*, yaitu proses melemahnya ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber utama penghidupan. Dalam konteks penelitian ini, usaha peternakan rakyat tidak lagi diposisikan sebagai sektor masa depan oleh generasi muda karena dianggap memiliki tingkat risiko tinggi, pendapatan tidak pasti, dan membutuhkan tenaga kerja besar. Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan kawasan industri dan peluang kerja non-pertanian yang menawarkan pendapatan tetap, sistem kerja yang lebih jelas, serta status sosial yang dianggap lebih modern dibandingkan pekerjaan sebagai peternak. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *"Kalau kerja di pabrik penghasilannya pasti, sedangkan beternak harus menunggu lama."* (INF-05, Anggota Kurang Aktif, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan generasi muda untuk meninggalkan sektor peternakan bukan semata-mata karena rendahnya minat individu, tetapi berkaitan dengan rasionalitas ekonomi dan perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan. Dalam perspektif ekonomi rumah tangga pedesaan, pilihan pekerjaan sangat berkaitan dengan kemampuan sektor tersebut dalam memberikan keamanan ekonomi dan mobilitas sosial (Susilowati, 2005). Dalam konteks Kelompok Balai Ternak Buangsa, usaha peternakan kelompok belum mampu memberikan insentif ekonomi yang cukup kuat untuk menarik generasi muda terlibat secara aktif. Rendahnya produktivitas usaha, ketidakstabilan pendapatan, dan tingginya risiko usaha ternak menyebabkan sektor ini kalah bersaing dibandingkan pekerjaan di sektor industri. Penelitian Susilowati (2016) dan Nawafi et al. (2026) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian dan peternakan berkaitan dengan: persepsi negatif terhadap pekerjaan pertanian, rendahnya pendapatan usaha tani, tingginya risiko usaha, serta terbatasnya inovasi dan akses teknologi di pedesaan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi dalam penelitian ini, di mana usaha peternakan kelompok masih dipersepsikan sebagai pekerjaan tradisional yang identik dengan kerja fisik berat dan ketidakpastian ekonomi. Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya regenerasi berkaitan dengan tidak berkembangnya sistem transfer pengetahuan dan kaderisasi dalam kelompok. Kelompok belum memiliki strategi khusus untuk melibatkan generasi muda dalam proses pembelajaran usaha ternak maupun pengelolaan organisasi

kelompok. Hal ini disampaikan informan yang mengatakan: “Belum ada upaya khusus untuk mengajak anak muda masuk kelompok.” (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regenerasi belum menjadi agenda strategis dalam pengembangan kelompok. Padahal, dalam organisasi berbasis komunitas, regenerasi merupakan bagian penting dari keberlanjutan kelembagaan karena berkaitan dengan transfer pengalaman, kepemimpinan, dan kapasitas sosial kelompok. Akibat lemahnya regenerasi, kelompok mengalami ketergantungan tinggi terhadap anggota lama yang kapasitas fisik dan produktivitasnya semakin menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan kemampuan kelompok untuk berkembang menjadi semakin terbatas. Selain itu, perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan juga berkaitan dengan pola hubungan sosial masyarakat. Sebelumnya, masyarakat pedesaan cenderung memiliki ikatan sosial kolektif yang kuat melalui aktivitas gotong royong dan kerja bersama. Namun, meningkatnya orientasi ekonomi individual dan mobilitas kerja menyebabkan hubungan sosial masyarakat menjadi lebih longgar dan pragmatis (Pranadji, 2002). Hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan: “Sekarang orang lebih fokus mencari penghasilan masing-masing.” (INF-02, Anggota Aktif, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dari solidaritas kolektif menuju orientasi individualistik. Dalam perspektif Durkheim (2018) perubahan struktur ekonomi masyarakat dapat berkaitan dengan bentuk solidaritas sosial dalam komunitas. Ketika masyarakat semakin terdiferensiasi secara ekonomi, maka solidaritas mekanik berbasis kedekatan sosial akan melemah dan digantikan oleh hubungan yang lebih individualistis. Dalam konteks kelompok peternak, perubahan tersebut menyebabkan semakin sulit membangun kerja sama kolektif yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan solidaritas sosial yang kuat. Anggota cenderung lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi individual dibandingkan keberlanjutan kelompok secara kolektif.

Kondisi ini juga berdampak terhadap pola partisipasi anggota muda yang cenderung pragmatis. Generasi muda hanya tertarik terlibat apabila kelompok mampu memberikan manfaat ekonomi yang cepat dan nyata. Hal ini diungkapkan oleh informan yang mengatakan: *“Kalau hasilnya jelas mungkin anak muda tertarik, tapi kalau lama biasanya mereka tidak mau.”* (INF-08, Pendamping Program, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kelompok peternak saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan teknis produksi. Kelompok harus berhadapan dengan perubahan struktur ekonomi pedesaan yang menyebabkan sektor peternakan rakyat semakin kehilangan daya tarik sosial dan ekonomi bagi generasi muda. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan belum sepenuhnya mampu merespons perubahan sosial tersebut. Pendekatan penyuluhan masih lebih berfokus pada peningkatan produksi ternak dibandingkan membangun inovasi sosial dan ekonomi yang mampu menarik minat generasi muda. Padahal, menurut Giddens (2023) masyarakat modern ditandai oleh meningkatnya refleksivitas sosial, di mana individu semakin rasional dalam menentukan pilihan pekerjaan berdasarkan peluang ekonomi dan masa depan sosial yang dianggap lebih menjanjikan. Dalam situasi tersebut, regenerasi peternak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan moral atau ajakan normatif untuk melanjutkan usaha keluarga, tetapi harus dibangun melalui transformasi usaha peternakan menjadi sektor yang: produktif secara ekonomi, inovatif secara teknologi, fleksibel terhadap perubahan pasar, serta memiliki nilai sosial yang relevan bagi generasi muda (Selvia et al., 2025; Simamora & Matoneng, 2025)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan regenerasi dan perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan menjadi faktor struktural yang memperlemah keberlanjutan kelompok peternak. Rendahnya keterlibatan generasi muda berkaitan dengan: perubahan orientasi pekerjaan masyarakat pedesaan, rendahnya daya tarik ekonomi sektor peternakan, tingginya risiko usaha ternak rakyat, lemahnya sistem kaderisasi kelompok, serta menguatnya orientasi individualistik dalam masyarakat pedesaan. Temuan ini mempertegas bahwa keberlanjutan kelompok peternak tidak hanya ditentukan oleh penguatan teknis dan kelembagaan internal, tetapi juga sangat berkaitan dengan dinamika transformasi sosial ekonomi pedesaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan kelompok peternak ke depan perlu mengintegrasikan strategi regenerasi pemuda, inovasi ekonomi pedesaan, dan modernisasi usaha peternakan agar sektor peternakan rakyat tetap memiliki relevansi sosial dan ekonomi bagi generasi muda di pedesaan (Chatra et al., 2025; Takari & Subagio, 2025).

Implikasi Strategis bagi Pengembangan Pendekatan Penyuluhan yang Lebih Partisipatif, Kontekstual, dan Berkelanjutan

Hasil penelitian pada Kelompok Balai Ternak "Buangsa" di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang menunjukkan bahwa kegagalan dinamika partisipatif dalam kelompok peternak tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan bantuan teknis maupun distribusi sarana produksi ternak. Persoalan utama justru terletak pada lemahnya relasi sosial, rapuhnya kelembagaan kelompok, menurunnya modal sosial, tekanan ekonomi rumah tangga, serta pendekatan penyuluhan yang belum sepenuhnya mampu membangun kapasitas kolektif masyarakat secara berkelanjutan. Temuan tersebut memberikan implikasi strategis bahwa sistem penyuluhan peternakan di pedesaan memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan transfer teknologi menuju pendekatan pemberdayaan sosial yang lebih partisipatif, kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan kelembagaan komunitas (Simamora & Matoneng, 2025; Wijeratne, 2024; Prajapati et al., 2025; Ongachi & Belinder, 2025)

Reorientasi Penyuluhan dari Technology Transfer menuju Social Facilitation

Hasil penelitian pada Kelompok Balai Ternak "Buangsa" di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang menunjukkan bahwa kegagalan dinamika partisipatif dalam kelompok peternak tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan bantuan teknis maupun distribusi sarana produksi ternak. Persoalan utama justru terletak pada lemahnya relasi sosial, rapuhnya kelembagaan kelompok, menurunnya modal sosial, tekanan ekonomi rumah tangga, serta pendekatan penyuluhan yang belum sepenuhnya mampu membangun kapasitas kolektif masyarakat secara berkelanjutan. Temuan tersebut memberikan implikasi strategis bahwa sistem penyuluhan peternakan di pedesaan memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan transfer teknologi menuju pendekatan pemberdayaan sosial yang lebih partisipatif, kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan kelembagaan komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dalam kelompok masih didominasi oleh orientasi teknis, seperti: manajemen pakan, penggemukan ternak, dan pemasaran hasil ternak, sementara aspek: komunikasi kelompok, penguatan organisasi, trust sosial, dan resolusi konflik masih kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan masih berjalan dalam paradigma technology transfer, di mana penyuluh diposisikan sebagai sumber utama pengetahuan dan peternak sebagai penerima inovasi. Padahal, studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan modern sangat ditentukan oleh kemampuan penyuluh membangun: pembelajaran kolektif, fasilitasi sosial, dialog partisipatif, dan kolaborasi antaraktor. Penelitian Tran et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang terlalu hierarkis dan top-down menyebabkan rendahnya trust petani terhadap penyuluh dan melemahkan partisipasi substantif kelompok tani maupun peternak. Sementara itu, penelitian Martini et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan farmer-to-farmer extension yang berbasis hubungan sosial dan pembelajaran kolektif lebih efektif dalam membangun partisipasi dan keberlanjutan kelompok dibandingkan pendekatan instruksional konvensional. Dengan demikian, implikasi strategis dari penelitian ini adalah bahwa penyuluh perlu bertransformasi dari: "technical instructor" menjadi: "social facilitator and community organizer". Peran penyuluh tidak lagi terbatas pada penyampaian inovasi teknis, tetapi juga: memfasilitasi dialog kelompok, membangun komunikasi partisipatif, memperkuat kapasitas reflektif anggota, dan mendorong terbentuknya tindakan kolektif yang lebih demokratis

Penguatan Kelembagaan Sosial sebagai Inti Penyuluhan Berkelanjutan

Penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya aturan kelompok, rendahnya monitoring internal, dan tidak berjalannya kontrol sosial menyebabkan meningkatnya perilaku oportunistik dan melemahnya solidaritas kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kelompok peternak sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan sosial (*social institutions*), bukan hanya keberhasilan teknis usaha ternak. Penelitian Anindyasari et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kelompok peternak membutuhkan pendekatan partisipatif yang menempatkan anggota kelompok sebagai aktor utama dalam penyusunan aturan, pembagian peran, monitoring organisasi, dan evaluasi kolektif. Selain itu, penelitian Mathanda et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas modal sosial dan hubungan kelembagaan memiliki keterkaitan signifikan terhadap bentuk dan kualitas partisipasi dan keberlanjutan adopsi inovasi pertanian di tingkat petani kecil. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi strategis bagi penyuluhan adalah perlunya: penguatan tata kelola kelompok, pembangunan aturan kolektif yang legitimate, peningkatan transparansi organisasi, serta pengembangan mekanisme kontrol sosial yang adil dan partisipatif. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya menghasilkan peningkatan

kapasitas teknis individu, tetapi juga memperkuat: “collective institutional capacity” kelompok peternak.

Penyuluhan Berbasis Trust Building dan Modal Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal dan menurunnya kepercayaan sosial menjadi faktor penting yang mempercepat kegagalan dinamika partisipatif kelompok. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kelompok peternak tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial dan tingkat kepercayaan antaranggota. Penelitian Hasdiansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa jaringan pembelajaran kolaboratif dan komunikasi interpersonal yang setara memiliki keterkaitan penting terhadap keberhasilan pemberdayaan ekonomi petani. Sementara itu, studi Hofer & Kaufmann (2023) menegaskan bahwa kualitas partisipasi sangat ditentukan oleh: distribusi kekuasaan, keterbukaan komunikasi, dan legitimasi proses partisipasi. Implikasi strategisnya adalah bahwa penyuluhan perlu diarahkan untuk membangun: budaya dialog, komunikasi horizontal, forum refleksi kelompok, dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Pendekatan penyuluhan harus mampu menghasilkan: “trust-building process” yang memperkuat: solidaritas sosial, kohesivitas kelompok, dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi kelompok.

Pendekatan Penyuluhan Berbasis Livelihood Security dan Diversifikasi Usaha Peternak

Keberadaan tekanan ekonomi rumah tangga peternak di pedesaan Subang menuntut adanya pergeseran paradigma penyuluhan dari yang semula berfokus pada target teknis produksi menuju pendekatan yang lebih peka terhadap strategi bertahan hidup rumah tangga (household survival strategies). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan partisipasi anggota erat kaitannya dengan kalkulasi rasional peternak kecil yang harus memprioritaskan pekerjaan harian dengan upah pasti demi mencukupi kebutuhan pangan keluarga dibandingkan mengalokasikan waktu untuk usaha peternakan kelompok yang hasilnya tidak menentu. Ketika bobot ternak tidak mencapai target pasar menjelang Idul Adha akibat kendala kualitas pakan dan pemeliharaan tradisional, legitimasi ekonomi kelompok langsung runtuh di mata anggotanya. Oleh sebab itu, implikasi strategis bagi program penyuluhan ke depan adalah pentingnya mengintegrasikan aspek keamanan penghidupan (livelihood security) ke dalam desain pendampingan kelompok. Penyuluh tidak boleh hanya mentransfer teknologi budidaya ternak secara searah, tetapi juga harus memfasilitasi diversifikasi usaha yang mampu menghasilkan pendapatan harian (daily cash flow) bagi rumah tangga peternak. Diversifikasi ini dapat berupa pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik komersial, budidaya tanaman pakan terintegrasi dengan hortikultura pekarangan, atau penyediaan jasa pengolahan pakan lokal murah. Dengan tersedianya sumber pendapatan alternatif yang bersifat jangka pendek dan stabil di bawah naungan kelompok, kerentanan ekonomi peternak kecil dapat diminimalkan. Pendekatan ini secara langsung akan mengurangi insentif bagi tindakan oportunistik anggota, seperti menjual ternak secara panen dini kepada tengkulak, serta serta membangun kembali ketahanan sosial kelompok peternak dalam menghadapi dinamika industrialisasi pedesaan yang menekan sektor pertanian tradisional.

Pengembangan Penyuluhan Kolaboratif dan Multiaktor

Penelitian memperlihatkan bahwa kompleksitas persoalan kelompok peternak tidak dapat diselesaikan hanya oleh penyuluh secara individual. Persoalan yang dihadapi meliputi: kelembagaan, pemasaran, regenerasi, konflik sosial, dan tekanan ekonomi rumah tangga, sehingga membutuhkan pendekatan lintas sektor dan multiaktor. Penelitian Tufail et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem penyuluhan partisipatif berbasis kolaborasi antaraktor lebih efektif dalam meningkatkan keberlanjutan kelompok petani kecil dibandingkan pendekatan sektoral konvensional. Implikasi strategisnya adalah bahwa model penyuluhan perlu dikembangkan melalui: “*collaborative extension system*” yang melibatkan: pemerintah desa, dinas peternakan, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, dan komunitas peternak lokal. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk: memperkuat sumber daya kelompok, memperluas akses pasar, meningkatkan inovasi, dan membangun keberlanjutan kelembagaan kelompok. 6. Penyuluhan Berbasis Keberlanjutan dan Regenerasi Peternak

Penelitian menunjukkan bahwa kelompok menghadapi krisis regenerasi akibat rendahnya keterlibatan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kelompok peternak tidak cukup hanya bergantung pada keberhasilan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan kelompok menciptakan regenerasi sosial yang berkelanjutan. Penelitian Purnomo et al. (2025); Ayuni (2025) menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian sangat berkaitan dengan: peluang

inovasi, akses teknologi, prospek ekonomi, dan citra sosial sektor agraris. Implikasi strategisnya adalah bahwa penyuluhan perlu diarahkan pada: pengembangan peternakan modern berbasis teknologi, penguatan kewirausahaan pemuda, pembentukan komunitas agripreneur muda, dan pembangunan citra peternakan sebagai sektor inovatif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pendekatan penyuluhan yang relevan bagi kelompok peternak pedesaan harus memiliki tiga karakter utama: (1) Partisipatif: Mendorong komunikasi dialogis, distribusi kekuasaan yang lebih setara, dan keterlibatan substantif anggota kelompok; (2) Kontekstual: Mampu memahami dinamika sosial ekonomi lokal, perubahan struktur pedesaan, dan kebutuhan riil rumah tangga peternak, dan (3) Berkelanjutan: Berorientasi pada penguatan kelembagaan sosial, regenerasi peternak, modal sosial, dan kemandirian kelompok dalam jangka panjang. Dengan demikian, penyuluhan peternakan tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses transfer teknologi, tetapi sebagai: proses transformasi sosial dan kelembagaan yang bertujuan membangun: kapasitas kolektif, solidaritas sosial, kemandirian komunitas, dan keberlanjutan kelompok peternak di pedesaan.

Implikasi Teoretis: Memperluas Perspektif Analitis Komunikasi Pembangunan

Temuan empiris dari kasus Kelompok Balai Ternak "Buangsa" memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan perspektif komunikasi pembangunan partisipatif yang lebih peka terhadap konflik dan konteks penghidupan. Kontribusi utama studi ini adalah sintesis analitis yang mempertemukan tindakan komunikatif dan distribusi kekuasaan (Habermas, 1985), kualitas partisipasi (Arnstein, 1969), modal sosial (Putnam, 1993), kelembagaan dan aturan bersama (Ostrom, 1990), serta rasionalitas ekonomi rumah tangga (Scott, 1977). Dalam kerangka ini, partisipasi dipahami bukan sebagai kondisi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses yang terbentuk melalui hubungan antara kualitas komunikasi, kapasitas kelembagaan, kepercayaan sosial, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan penghidupannya. Untuk studi kasus tunggal, sintesis tersebut lebih tepat diposisikan sebagai proposisi konseptual dan perluasan perspektif analitis yang dapat diuji atau dibandingkan pada konteks yang berbeda.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membaca temuan. Studi dilakukan pada satu kelompok peternak dengan delapan informan dalam konteks sosial-ekonomi tertentu di Kabupaten Subang, sehingga temuan ditujukan untuk kedalaman pemahaman kasus dan bukan generalisasi statistik. Selain itu, data terutama merekam pengalaman dan praktik dalam periode penelitian November–Desember 2025, sehingga dinamika kelompok setelah periode tersebut belum tercakup. Studi komparatif pada beberapa kelompok dan wilayah, serta penelitian mixed-methods pada tahap berikutnya, diperlukan untuk menguji keberlakuan proposisi konseptual dan mengukur pola hubungan yang ditemukan secara lebih luas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dinamika partisipatif dalam Kelompok Balai Ternak "Buangsa" terbentuk melalui keterkaitan antara kualitas komunikasi, ketimpangan relasi kekuasaan, kelemahan kelembagaan, erosi kepercayaan, tekanan ekonomi rumah tangga, dan keterbatasan pendekatan pendampingan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi tidak memadai jika dijelaskan hanya melalui motivasi individu, karena pengalaman anggota menunjukkan adanya kondisi relasional dan institusional yang membatasi ruang partisipasi substantif.

Kelembagaan kelompok masih lemah. Tidak adanya aturan kolektif tertulis, lemahnya monitoring internal, dan tidak berjalannya kontrol sosial berkaitan dengan ketimpangan kontribusi serta perilaku oportunistik. Kondisi tersebut memperlemah disiplin kolektif dan kapasitas organisasi untuk mempertahankan kerja sama.

Konflik internal dalam pengelolaan ternak dan rendahnya transparansi berkaitan dengan menurunnya kepercayaan sosial dan kohesivitas kelompok. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi rumah tangga membuat sebagian anggota memprioritaskan pekerjaan harian dan menjual ternak sebelum tujuan usaha kelompok tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan partisipasi perlu dibaca dalam kaitannya dengan kondisi penghidupan anggota, bukan semata-mata dari mekanisme internal organisasi.

Dari aspek penyuluhan, pendamping telah berperan dalam aspek teknis dan keberlangsungan kegiatan, tetapi pendampingan belum sepenuhnya menjangkau penguatan komunikasi kelompok, penyelesaian konflik, pembangunan kepercayaan, dan kemandirian kelembagaan. Ketergantungan terhadap pendamping karena itu menjadi isu penting bagi desain penyuluhan yang berkelanjutan.

Perubahan struktur sosial-ekonomi pedesaan juga menjadi konteks penting. Terbukanya pekerjaan di sektor industri dan non-pertanian membuat sebagian generasi muda lebih memilih pekerjaan dengan

pendapatan yang lebih pasti. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan kelompok peternak berhadapan dengan perubahan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis analitis yang menghubungkan komunikasi partisipatif, kelembagaan, modal sosial, dan kondisi penghidupan rumah tangga untuk menjelaskan bagaimana partisipasi semu terbentuk dalam kasus kelompok peternak. Studi ini tidak mengusulkan teori baru, tetapi menawarkan proposisi konseptual bahwa kualitas partisipasi merupakan konstruksi sosial yang perlu dipahami melalui interaksi antara komunikasi, distribusi kekuasaan, aturan kelembagaan, trust, dan strategi penghidupan.

Secara praktis, pendekatan penyuluhan perlu bergerak dari orientasi transfer teknologi menuju fasilitasi sosial yang dialogis, kontekstual, dan berkelanjutan. Penyuluh dan pendamping perlu memperkuat forum dialog, transparansi aturan dan keputusan, mekanisme penyelesaian konflik, pembangunan trust, serta regenerasi dan diversifikasi penghidupan peternak.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi kasus komparatif pada kelompok peternak dengan konteks pedesaan yang berbeda serta mixed-methods untuk menguji dan memperluas proposisi mengenai asimetri kekuasaan, trust, kualitas partisipasi, dan keberlanjutan kelompok.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan studi kasus komparatif (*comparative case studies*) yang membandingkan dinamika kelompok peternak di wilayah pedesaan agraris murni dengan wilayah pedesaan semi-industri. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) pada penelitian masa depan juga sangat direkomendasikan untuk mengukur derajat asimetri kekuasaan, tingkat kepercayaan sosial (*social trust*), dan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi kelompok peternak kecil secara lebih luas dan representatif.

KESIMPULAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan studi kasus komparatif (comparative case studies) yang membandingkan dinamika kelompok peternak di wilayah pedesaan agraris murni dengan wilayah pedesaan semi-industri. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (mixed-methods) pada penelitian masa depan juga sangat direkomendasikan untuk mengukur derajat asimetri kekuasaan, tingkat kepercayaan sosial (social trust), dan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi kelompok peternak kecil secara lebih luas dan representatif.

Kelembagaan kelompok masih lemah. Tidak adanya aturan kolektif tertulis, lemahnya monitoring internal, dan tidak berjalannya kontrol sosial berkaitan dengan ketimpangan kontribusi serta perilaku oportunistik. Kondisi tersebut memperlemah disiplin kolektif dan kapasitas organisasi untuk mempertahankan kerja sama.

Konflik internal dalam pengelolaan ternak dan rendahnya transparansi berkaitan dengan menurunnya kepercayaan sosial dan kohesivitas kelompok. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi rumah tangga membuat sebagian anggota memprioritaskan pekerjaan harian dan menjual ternak sebelum tujuan usaha kelompok tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan partisipasi perlu dibaca dalam kaitannya dengan kondisi penghidupan anggota, bukan semata-mata dari mekanisme internal organisasi.

Dari aspek penyuluhan, pendamping telah berperan dalam aspek teknis dan keberlangsungan kegiatan, tetapi pendampingan belum sepenuhnya menjangkau penguatan komunikasi kelompok, penyelesaian konflik, pembangunan kepercayaan, dan kemandirian kelembagaan. Ketergantungan terhadap pendamping karena itu menjadi isu penting bagi desain penyuluhan yang berkelanjutan.

Perubahan struktur sosial-ekonomi pedesaan juga menjadi konteks penting. Terbukanya pekerjaan di sektor industri dan non-pertanian membuat sebagian generasi muda lebih memilih pekerjaan dengan pendapatan yang lebih pasti. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan kelompok peternak berhadapan dengan perubahan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis analitis yang menghubungkan komunikasi partisipatif, kelembagaan, modal sosial, dan kondisi penghidupan rumah tangga untuk menjelaskan bagaimana partisipasi semu terbentuk dalam kasus kelompok peternak. Studi ini tidak mengusulkan teori baru, tetapi menawarkan proposisi konseptual bahwa kualitas partisipasi merupakan konstruksi sosial yang perlu dipahami melalui interaksi antara komunikasi, distribusi kekuasaan, aturan kelembagaan, trust, dan strategi penghidupan.

Secara praktis, pendekatan penyuluhan perlu bergerak dari orientasi transfer teknologi menuju fasilitasi sosial yang dialogis, kontekstual, dan berkelanjutan. Penyuluh dan pendamping perlu memperkuat

forum dialog, transparansi aturan dan keputusan, mekanisme penyelesaian konflik, pembangunan trust, serta regenerasi dan diversifikasi penghidupan peternak.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi kasus komparatif pada kelompok peternak dengan konteks pedesaan yang berbeda serta mixed-methods untuk menguji dan memperluas proposisi mengenai asimetri kekuasaan, trust, kualitas partisipasi, dan keberlanjutan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, A. (2021). Perilaku dan teori organisasi. Media Nusa Creative.

Anindyasari, D., Aprylasari, D., & Daulika, P. (2025). Participatory service model for strengthening sustainable poultry farming in the Bontang Lestari Area, Bontang Regency, East Kalimantan. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan, 2*(2), 154–163. https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i2.1650

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Ayuni, F. (2025). Analisis faktor-faktor yang memketerkaitani minat Generasi Z bekerja pada sektor pertanian dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. *Journal of Economics Development Research, 1*(1), 26–37. https://doi.org/10.71094/joeder.v1i1.58

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burris, B. H. (1989). Technocratic organization and control. *Organization Studies, 10*(1), 1–22. https://doi.org/10.1177/017084068901000101

Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. World Development, 22(9), 1253–1268. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?: Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.

Chatra, A., Dirna, F. C., Alhakim, R., Pujiriyani, D. W., Rosardi, R. G., Maulinda, I., Octaviani, T., Efitra, E., Hudang, A. K., & Latif, E. A. (2025). *Potensi dan sektor unggulan ekonomi desa*. Star Digital Publishing.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dewi, A. S., & Aesthetika, N. M. (2025). Group communication in rising students of Singapore Open University POKJAR: Komunikasi kelompok pada mahasiswa rising Universitas Terbuka POKJAR Singapura. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 13*(2), 143–152. https://doi.org/10.21070/kanal.v13i2.1803

Durkheim, E. (2018). The division of labor in society. In *Social stratification* (pp. 217–222). Routledge.

Fathurohman, F., Purwasih, R., Ekowati, T., Gayatri, S., & Adiwinarti, R. (2025). Revitalisasi sentra peternakan rakyat sebagai strategi transformasi ekonomi lokal di Jawa Barat. *Creative Research Journal, 11*(2), 99–110. https://doi.org/10.34147/crj.v11i02.426

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Friedman, J. (2019). *Power without knowledge: A critique of technocracy*. Oxford University Press.

Fukuyama, F. (1996). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Simon & Schuster.

Giddens, A. (2023). Modernity and self-identity. In *Social theory re-wired* (pp. 477–484). Routledge.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough?: An experiment with data saturation and variability. *Field Methods, 18*(1), 59-82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Beacon press.

Hasdiansyah, A., Ridwan, I., Ida, N., & Salama, S. (2025). Collaborative learning networks for farmer

economic empowerment: A literature review. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), 12*(1), 105–120. https://doi.org/10.21831/jppm.v12i1.84809

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, Article 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523

Hofer, K., & Kaufmann, D. (2023). Actors, arenas and aims: A conceptual framework for public participation. *Planning Theory, 22*(4), 357–379. https://doi.org/10.1177/14730952221139587

Irma, I., Purnama, I., Juanda, F., & Raisa, D. M. (2025). Peran usaha ternak dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga: Kajian studi literatur: The role of livestock businesses in supporting food security and family economics: A literature review. *Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo, 7*(4), 511–517. https://doi.org/10.56625/jipho.v7i4.406

Kvale, S. (1996). *An introduction to qualitative research interviewing*. SAGE Publications.

Leeuwis, C. (2013). *Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension*. John Wiley & Sons.

Listiana, I. (2018). *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kapasitas penyuluh di Provinsi Lampung*. IPB University Scientific Repository.

Long, N. (2003). *Development sociology: Actor perspectives*. Routledge.

Martini, E., Pagella, T., Mollee, E., & van Noordwijk, M. (2023). Relational values in locally adaptive farmer-to-farmer extension: How important? *Current Opinion in Environmental Sustainability, 65*, Article 101363. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101363

Mathanda, H., Pangapanga-Phiri, I., Tufa, A., Mangisoni, J., Alene, A., Ngoma, H., Phiri, H. H., & Chikoye, D. (2025). Does social capital influence the intensity of conservation agriculture adoption among smallholder farmers in Malawi? *Environmental and Sustainability Indicators, 26,* Article 100630. https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100630

Mighfar, S. (2015). Social exchange theory: Telaah konsep George C. Homans tentang teori pertukaran sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9*(2), 259–282. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.98

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mouritsen, P. (2003). What's the civil in civil society? Robert Putnam, Italy and the republican tradition. *Political Studies, 51*(4), 650–668. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00451

Mumba, C., Kasanga, B., Mwamba, C. T., Sichilima, T., Siankwilimba, E., Sitali, D. C., Munkombwe, J., Banda, R., & Muma, J. B. (2024). An in-depth analysis of factors influencing small-scale cattle farmers' participation in livestock markets in Western Province of Zambia: Navigating challenges and barriers. *Frontiers in Veterinary Science, 11,* Article 1397000. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1397000

Musabbikhin, A., Satmoko, S., & Prasetyo, A. S. (2020). Hubungan kohesivitas dengan partisipasi anggota pada Kelompok Tani Ternak Rejeki Lumintu di Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 13*(3), 232–241. https://doi.org/10.19184/jsep.v13i3.18537

Nawafi, K., Jufri, A., & Hidayat, A. A. (2026). Analisis rendahnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. *Economic Reviews Journal, 5*(2), 663–679. https://doi.org/10.56709/mrj.v5i2.1095

Ongachi, W., & Belinder, I. (2025). Agricultural extension as a pathway to livelihood diversification and sustainable development in rural communities: A systematic review. *BMC Agriculture, 1*(1), Article 6. https://doi.org/10.1186/s44342-025-00006-x

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Perkasa, M. P. A., & Anang, R. H. (2026). Studi komunikasi interpersonal kelompok tani "Anggrek"

dalam aktivitas penyuluhan pertanian di BPP Merapi Barat Selatan Kabupaten Lahat. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 14*(2), 71–77. https://doi.org/10.32502/jsct.v14i2.10921

Prajapati, C. S., Priya, N. K., Bishnoi, S., Vishwakarma, S. K., Buvaneswari, K., Shastri, S., Tripathi, S., & Jadhav, A. (2025). The role of participatory approaches in modern agricultural extension: Bridging knowledge gaps for sustainable farming practices. *Journal of Experimental Agriculture International, 47*(2), 204–222. https://doi.org/10.9734/jeai/2025/v47i23281

Pranadji, T. (2002). Gejala kesenjangan antara ideologi dan pragmatisme pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 20*(2), 47–59. https://doi.org/10.21082/fae.v20n2.2002.47-59

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development, 23*(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Purnomo, S. D., Badriah, L. S., & Dharmawan, B. (2026). Key determinants of young horticulture farmers' agribusiness activities in Purbalingga. *Iqtishaduna International Conference Proceeding*, 95–103. https://www.researchgate.net/publication/402527103_KEY_DETERMINANTS_OF_YOUNG_HORTICULTURE_FARMERS'_AGRIBUSINESS_ACTIVITIES_IN_PURBALINGGA

Putnam, R. D. (1993). What makes democracy work? *National Civic Review, 82*(2), 101–107. https://doi.org/10.1002/ncr.4100820204

Ramadwika, R. (2025). Peran penyuluh pertanian sebagai edukator dan motivator dalam peningkatan kapasitas kelompok tani di Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi "SainTek", 2*(2), 910–916. https://conference.ut.ac.id/index.php/saintek/article/view/6918

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Roslinda, R. (2025). Dinamika sosial dalam kelompok tani ternak: Studi kasus komunikasi dan kerja sama di komunitas peternak kambing. *Journal of Livestock Science and Innovation Global, 1*(1), 19–24. https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jlsig/article/view/57

Sadono, D. (2008). Pemberdayaan petani: Paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan, 4*(1), 65–74. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170

Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & Quantity, 52*(4), 1893-1907. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8

Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *Modal sosial dan pembangunan masyarakat*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Scott, J. C. (1977). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.

Selvia, J., Rasyid, E., Ismiani, S., Kusumanti, I., Gitosaputro, S., Mahmuda, L. A., & Heryanto, R. (2025). *Petani Muda dan Keberlanjutan Pertanian Indonesia*. Kamiya Jaya Aquatic.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Setiawati, R., Effendy, L., & Mayangsari, R. (2026). Tingkat keberhasilan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penyuluhan, 22*(1), 14–25. https://doi.org/10.25015/22202664940

Simamora, T., & Matoneng, O. W. (2025). *Transformasi penyuluhan peternakan sapi potong di wilayah perbatasan*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Siregar, A. N., & Saridewi, T. R. (2010). Hubungan antara motivasi dan budaya kerja dengan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian, 5*(1), 24–35.

Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.

Sugiarto, M., Setiana, L., & Subejo, S. (2019). Kualitas pelayanan penyuluhan pada peternak kambing

skala kecil di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Penyuluhan, 15*(1), 81–93. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.21002

Susilowati, S. H. (2005). Dampak mobilitas tenaga kerja terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *5*(1), 43914.

Susilowati, S. H. (2016). Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34*(1), 35–55. https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.35-55.

Takari, D., & Subagio, M. S. (2025). *Ekonomi pembangunan desa dan agroekoteknologi: Sinergi kemandirian dan keberlanjutan desa*. Deepublish.

Thornton, S. C., Henneberg, S. C., & Naudé, P. (2014). Conceptualizing and validating organizational networking as a second-order formative construct. *Industrial Marketing Management, 43*(6), 951–966. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.05.001.

Torrido, A. (2026). Proses pergeseran makna sentra bagi UMKM sentra ayam goreng Kalasan: Sebelum dan sesudah program CSR TWC. *Jurnal Penyuluhan, 22*(1), 1–13. https://doi.org/10.25015/22202667772

Tran, T. A., Cook, B. R., & Touch, V. (2025). Agricultural extension institutions in rural Cambodia: Unpacking extension agent-farmer relations and interactions. *Journal of Rural Studies, 117*, Article 103671. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103671

Tuckman, B. W. (2001). Developmental sequence in small groups. *Group Facilitation: A Research and Applications Journal,* (3), 67–81. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/developmental_sequence_in_small_groups_-_reprint.pdf

Tufail, M. S., Krebs, G. L., Quddus, M. S., Southwell, A., Piltz, J. W., Norton, M. R., & Wynn, P. C. (2025). Empowering smallholder farmers by integrating participatory research and establishing village-based forage seed enterprises to enhance on-farm productivity and local seed supply. *Seeds, 4*(3), Article 40. https://doi.org/10.3390/seeds4030040

Untari, F. D., Sadono, D., & Effendy, L. (2022). Partisipasi anggota kelompok tani dalam pengembangan usahatani hortikultura di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. *Jurnal Penyuluhan, 18*(1), 88–101. https://doi.org/10.25015/18202239038

Van der Ploeg, J. D. (2017). Peasant-driven agricultural growth and food sovereignty. In *Critical perspectives on food sovereignty* (pp. 99–130). Routledge.

Wahib, M., & Susanto, A. (2024). Pendidikan berbasis komunitas: Membangun ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan masyarakat. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences, 2*(6), 330–341. https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i6.156

Wesley, K. L., Mahlengule, Z. E., & Simon, L. S. (2025). Agriculture extension service for smallholder livestock farmers in communal land of Mopani District in Limpopo Province. *Research in Agriculture Livestock and Fisheries, 12*(3), 415–426. https://doi.org/10.3329/ralf.v12i3.86280

Wijeratne, M., & De Silva, W. N. (2024). The paradigm shift of agricultural extension from technology transfer towards participatory approaches. *The Journal of Agricultural Sciences - Sri Lanka, 19*(1), 1–13. https://doi.org/10.4038/jas.v19i1.9851

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE Publications.